

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 (24 Juni – 9 Juli 2025)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PLT. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
D. TUGAS KHUSUS	3
KOMISI II	4
A. FUNGSI LEGISLASI	4
B. FUNGSI ANGGARAN	4
C. FUNGSI PENGAWASAN	17
KOMISI III	24
A. FUNGSI LEGISLASI	24
B. FUNGSI ANGGARAN	25
C. FUNGSI PENGAWASAN	29
KOMISI IV	30
A. FUNGSI LEGISLASI	30
B. FUNGSI ANGGARAN	30
C. FUNGSI PENGAWASAN	31

KOMISI V	35
A. FUNGSI LEGISLASI	35
B. FUNGSI ANGGARAN	35
C. FUNGSI PENGAWASAN	36
KOMISI VI	38
A. FUNGSI LEGISLASI	38
B. FUNGSI ANGGARAN	39
C. FUNGSI PENGAWASAN	39
KOMISI VII	41
A. FUNGSI LEGISLASI	41
B. FUNGSI ANGGARAN	41
C. FUNGSI PENGAWASAN	41
KOMISI VIII	44
A. FUNGSI LEGISLASI	44
B. FUNGSI ANGGARAN	44
C. FUNGSI PENGAWASAN	46

KOMISI IX	48
A. FUNGSI LEGISLASI	48
B. FUNGSI ANGGARAN	48
C. FUNGSI PENGAWASAN	48
KOMISI X	51
A. FUNGSI LEGISLASI	51
B. FUNGSI ANGGARAN	51
C. FUNGSI PENGAWASAN	59
KOMISI XI	62
A. FUNGSI LEGISLASI	62
B. FUNGSI ANGGARAN	62
C. FUNGSI PENGAWASAN	72
D. TUGAS KHUSUS	74
KOMISI XII	76
A. FUNGSI LEGISLASI	76
B. FUNGSI ANGGARAN	76
C. FUNGSI PENGAWASAN	78

KOMISI XIII	83
A. FUNGSI LEGISLASI	83
B. FUNGSI ANGGARAN	83
C. FUNGSI PENGAWASAN	84
BADAN LEGISLASI	85
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	91
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	103
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	105
BADAN ANGGARAN	107
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	109
BADAN ASPIRASI MASYARAKAT	112

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemkomdigi	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkomdigi dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Kemkomdigi APBN TA 2024; 2. Pembahasan RKA dan RKP Kemkomdigi Tahun 2026.	
2.	BSSN, Bakamla, dan Lemhannas	Rapat Kerja/RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN, Kepala Bakamla dan Gubernur Lemhannas dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan BSSN/Bakamla/Lemhanans APBN TA 2024; 2. Pembahasan RKA dan RKP BSSN/Bakamla/Lemhannas Tahun 2026.	
3.	Kemlu	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menlu dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Kemlu APBN TA 2024; 2. Pembahasan RKA dan RKP Kemlu Tahun 2026.	
4.	BIN	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan BIN APBN TA 2024; 2. Pembahasan RKA dan RKP BIN Tahun 2026.	
5.	Kemhan	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Kemhan/TNI APBN TA 2024; 2. Pembahasan RKA dan RKP Kemhan/TNI Tahun 2026.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Intern	Rapat Intern Komisi I DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Rekapitulasi hasil Pembahasan Laporan Keuangan Mitra Kerja Komisi I DPR RI APBN TA 2024; 2. Rekapitulasi hasil Pembahasan RKA dan RKP Mitra Kerja Komisi I DPR RI Tahun 2026	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemlu	Raker Komisi I DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 30 Juni 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Kondisi Geopolitik dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri; dan 2. Lain-lain.	
2.	BIN	Raker Komisi I DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Kondisi Geopolitik Internasional dan dampaknya terhadap keamanan nasional; dan 2. Lain-lain.	
3.	Kemhan dan Panglima TNI beserta para Kepala Staf TNI	Raker Komisi I DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Kondisi Geopolitik dan Skema Pertahanan Indonesia; dan 2. Lain-lain.	
4.	Kemhan/Panglima TNI	Kunjungan Kerja ke Provinsi Riau Korem 031/Wira Bima, dilaksanakan pada hari Kamis – Sabtu, tanggal 3 – 5 Juli 2025.	Persiapan dan Kesiapan Korem 031/Wira Bima dalam Transformasi Menuju Kodam.	
5.		Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung Korem 043/Garuda Hitam, dilaksanakan pada hari Kamis – Sabtu, tanggal 3 – 5 Juli 2025.	Persiapan dan Kesiapan Korem 043/Garuda Hitam dalam Transformasi Menuju Kodam.	
6.		Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah Korem 102/Panju Panjung,	Persiapan dan Kesiapan Korem 102/Panju Panjung dalam Transformasi Menuju Kodam.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan pada hari Kamis – Sabtu, tanggal 3 – 5 Juli 2025.		
7.	Kemlu	<i>Courtesy Call</i> dengan Parlemen Belanda dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025.	Terkait pembicaraan hubungan bilateral Antara Indonesia-Belanda.	

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Calon DUBES LBBP untuk Negara Sahabat/Organisasi Internasional	Komisi I DPR RI telah melaksanakan Uji Kelayakan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 5 dan 6 Juli 2025.	Berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Juli 2025 yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Surat Presiden Nomor R-36/Pres/07/2025 , tanggal 1 Juli 2025 Hal. Permohonan Pertimbangan terhadap Calon Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat dan Organisasi Internasional, dan Surat Pimpinan DPR RI Nomor B/8958/PW.01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 Hal. Penugasan Pembahasan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. KPU RI b. Bawaslu RI	Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI dan Bawaslu RI, dengan agenda pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024, serta pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, hari Senin, 7 Juli 2025.	1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) sebagai berikut: A. KPU RI a. Realisasi APBN tahun 2024 sebesar Rp25.526.431.033.899,- (dua puluh lima triliun lima ratus dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp25.795.195.581.000,- (dua puluh lima triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 98.96%; b. Pagu indikatif RAPBN tahun 2026 sebesar Rp2.768.839.731.000,- (dua triliun tujuh ratus enam	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);</i></p> <p>c. Usulan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp986.059.941.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);</p> <p>B. Bawaslu RI</p> <p>a. Realisasi APBN tahun 2024 sebesar Rp.15.689.749.723.604,- (lima belas triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.17.984.003.264.000,- (tujuh belas triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 87.24%;</p> <p>b. Pagu indikatif RAPBN tahun 2026 sebesar Rp1.987.386.912.000,- (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);</p> <p>2. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2025 dan pagu alokasi anggaran tahun 2026 beserta rinciannya sesuai</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2026 yang akan datang.	
2.	a. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP b. Ketua DKPP c. Kepala OIKN	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPP, Ketua DKPP, dan Kepala OIKN, dengan agenda pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024, serta pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, hari Selasa, 8 Juli 2025.	<p>1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan tentang laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024, serta pendahuluan RAPBN TA 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait laporan keuangan TA 2024 yang pada umumnya telah mencapai target serapan anggaran. Komisi II DPR RI menekankan pentingnya evaluasi kualitas belanja agar berdampak pada pelayanan publik, penataan wilayah, serta efektivitas program prioritas nasional.</p> <p>2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)</p> <p>a. Realisasi APBN tahun 2024 sebesar Rp5.169.335.036.396,- (<i>lima triliun seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp5.354.037.566.000,- (<i>lima triliun tiga ratus lima puluh empat miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah</i>) atau sebesar 96.55%. Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk realisasi</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>anggaran DKPP sebesar Rp75.723.751.229,- (<i>tujuh puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran DKPP tahun 2024 sebesar Rp76.268.173.000,- (<i>tujuh puluh enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah</i>) atau sebesar 99.29%.</p> <p>b. Pagu indikatif RAPBN tahun 2026 sebesar Rp3.244.174.658.000,- (<i>tiga triliun dua ratus empat puluh empat miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah</i>), sudah termasuk pagu indikatif DKPP tahun 2026 sebesar Rp21.776.030.000,- (<i>dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah</i>).</p> <p>c. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri menyampaikan rencana kerja prioritas tahun 2026 secara mendetail terkait konsolidasi demokrasi pascapemilu 2024, penguatan otonomi daerah, serta reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan transformasi digital.</p> <p>3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)</p> <p>a. Realisasi APBN tahun 2024 sebesar Rp231.636.430.063,- (<i>dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh tiga rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Rp236.349.314.000,- (dua ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) atau sebesar 98.01%.</p> <p>b. Pagu indikatif RAPBN tahun 2026 sebesar Rp131.115.351.000,- (seratus tiga puluh satu miliar seratus lima belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).</p> <p>c. Komisi II DPR RI meminta BNPP melaporkan progres pembangunan wilayah perbatasan, operasionalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan penataan batas wilayah negara secara detail untuk tahun 2024 sebagai bahan evaluasi, serta menyampaikan rencana kerja tahun 2026 yang selaras dengan arah kebijakan nasional untuk pemerataan pembangunan perbatasan.</p> <p>4. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)</p> <p>a. Pagu indikatif RAPBN tahun 2026 sebesar Rp21.776.030.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah).</p> <p>b. Komisi II DPR RI meminta DKPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mempercepat penyelesaian 90 perkara etik tersisa. - menyusun prioritas kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan integritas penyelenggara pemilu. <p>5. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Realisasi APBN tahun 2024 sebesar Rp626.241.907.418,- (<i>enam ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp672.117.450.000,- (<i>enam ratus tujuh puluh dua miliar seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah</i>) atau sebesar 93.17%.</p> <p>b. Pagu indikatif RAPBN tahun 2026 sebesar Rp5.050.046.870.000,- (<i>lima triliun lima puluh miliar empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah</i>).</p> <p>c. Komisi II DPR RI meminta OIKN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan capaian <i>outcome</i> dari setiap program, bukan hanya progres fisik, untuk menilai efektivitas pembangunan IKN. - Melengkapi dengan rencana kerja terukur dan <i>roadmap</i> pembangunan ekosistem IKN (perkantoran legislatif, yudikatif, akses jalan WP 1-3), serta manajemen risiko untuk menghindari pembengkakan biaya. - memperkuat koordinasi lintas K/L dan pemda sekitar IKN agar pembangunan berjalan terpadu, menghindari konflik lahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah penyangga IKN. <p>6. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diusulkan oleh Kemendagri, BNPP, DKPP dan OIKN sebagai berikut:</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Usulan tambahan anggaran tahun 2026 Kemendagri sebesar Rp3.145.931.679.000,- (tiga triliun seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sudah termasuk usulan tambahan anggaran tahun 2026 DKPP sebesar Rp.188.423.028.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah).</p> <p>b. Usulan tambahan anggaran tahun 2026 BNPP sebesar Rp235.184.696.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).</p> <p>c. Usulan tambahan anggaran tahun 2026 OIKN sebesar Rp16.129.953.130.000,- (enam belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).</p> <p>Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran dan akan membahas secara mendalam pada Raker dan RDP yang akan datang.</p> <p>7. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2025 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan, serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2026 yang akan datang.</p> <p>8. Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya prinsip pengelolaan anggaran, bahwa setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, tepat sasaran, dan membawa manfaat nyata bagi rakyat serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.</p> <p>9. Komisi II DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak rapat ini selesai.</p>	
3.	<p>a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI</p> <p>b. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI</p> <p>c. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI</p> <p>d. Kepala Arsip Nasional RI</p>	<p>Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024, serta pembicaraan pendahuluan</p>	<p>1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai berikut:</p> <p>A. Kementerian PANRB</p> <p>a. Realisasi APBN tahun 2024 sebesar Rp401.172.466.950,- (empat ratus satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp408.023.563.000,- (empat ratus delapan miliar</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	e. Ketua Ombudsman RI	RAPBN TA 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, hari Rabu, 9 Juli 2025.	<p>dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 98.32%;</p> <p>b. Pagu indikatif RAPBN tahun 2026 sebesar Rp208.158.536.000,- (dua ratus delapan miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).</p> <p>B. BKN</p> <p>a. Realisasi APBN tahun 2024 sebesar Rp1.500.101.756.801,- (satu triliun lima ratus miliar seratus satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp1.701.831.382.000,- (satu triliun tujuh ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 88.15%;</p> <p>b. Pagu indikatif RAPBN tahun 2026 sebesar Rp574.759.955.000,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).</p> <p>C. LAN</p> <p>a. Realisasi APBN tahun 2024 sebesar Rp319.654.539.949,- (tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dari pagu alokasi</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>anggaran tahun 2024 sebesar Rp324.073.949.000,- (<i>tiga ratus dua puluh empat miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah</i>) atau sebesar 98.64%;</p> <p>b. Pagu indikatif RAPBN tahun 2026 sebesar Rp264.337.919.000,- (<i>dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah</i>).</p> <p>D. ANRI</p> <p>a. Realisasi APBN tahun 2024 sebesar Rp275.165.875.155,- (<i>dua ratus tujuh puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp283.568.272.000,- (<i>dua ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah</i>) atau sebesar 97.04%;</p> <p>b. Pagu indikatif RAPBN tahun 2026 sebesar Rp254.335.383.000,- (<i>dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah</i>).</p> <p>E. ORI</p> <p>a. Realisasi APBN tahun 2024 sebesar Rp234.923.086.155,- (<i>dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus dua</i></p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>puluh tiga juta delapan puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah)</i> dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp240.707.875.000,- (dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 97.60%;</p> <p>b. Pagu indikatif RAPBN tahun 2026 sebesar Rp152.645.516.000,- (seratus lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah).</p> <p>2. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diusulkan oleh Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, dan ORI sebagai berikut:</p> <p>a. Usulan tambahan anggaran tahun 2026 Kementerian PANRB sebesar Rp314.746.280.000,- (tiga ratus empat belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);</p> <p>b. Usulan tambahan anggaran tahun 2026 BKN sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);</p> <p>c. Usulan tambahan anggaran tahun 2026 LAN sebesar Rp55.081.071.079,- (lima puluh lima miliar delapan puluh satu juta tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah);</p> <p>d. Usulan tambahan anggaran tahun 2026 ANRI sebesar Rp326.605.021.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus lima juta dua puluh satu ribu rupiah);</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>e. Usulan tambahan anggaran tahun 2026 ORI sebesar Rp117.990.999.000,- (seratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);</p> <p>Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tahun 2026 dan akan mem bahas nya secara mendalam pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang.</p> <p>3. Komisi II DPR RI menyetujui permintaan buka blokir anggaran ORI tahun 2025 sebesar Rp63.993.436.000,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam melaksanakan kegiatan prioritas nasional dan kegiatan prioritas lembaga.</p> <p>4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2025 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2026 yang akan datang.</p>	
4.	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala	Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan	1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) terkait realisasi APBN tahun 2024	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Badan Pertanahan Nasional RI	Nasional RI, dengan agenda pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024, serta pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, hari Rabu, 9 Juli 2025.	<p>sebesar Rp7.861.137.242.568,- (<i>tujuh triliun delapan ratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp7.937.040.305.000,- (<i>tujuh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah</i>) atau sebesar 99,04%.</p> <p>2. Terhadap realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 sebesar Rp2.718.460.282.241,- (<i>dua triliun tujuh ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah</i>) atau sebesar 47,86%, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN melakukan berbagai langkah strategis dalam percepatan realisasi anggaran secara efektif, efisien, dan berdampak langsung kepada masyarakat.</p> <p>3. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2026 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp7.786.095.763.000,- (<i>tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah</i>) dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2026 selanjutnya.</p> <p>4. Terkait usulan tambahan anggaran tahun 2026 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp3.631.468.669.000,- (<i>tiga triliun enam</i></p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>ratus tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah</i>), Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tahun 2026 dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat yang akan datang.</p> <p>5. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2025 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2026 yang akan datang.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian ATR/BPN	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Panja Pengawasan PNBP di Sektor Pertanahan Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian</p>	Rapat tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		ATR/BPN dan Seluruh Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian ATR/BPN, dengan agenda evaluasi proses dan sistem pemungutan dan pemanfaatan PNBPN dari sektor pertanahan, evaluasi kebijakan yang mengatur pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan, dan optimalisasi dan eksplorasi potensi PNBPN di sektor pertanahan, hari Kamis, 26 Juni 2024.		
2.	a. Menteri dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi b. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri c. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) d. Kepala Kantor Regional BKN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Kantor Regional BKN, dan Kepala Daerah se-Indonesia,	1. Komisi II DPR RI mendesak Kementerian PANRB, BKN, dan pemerintah daerah untuk mempercepat dan menuntaskan proses penetapan NIP CPNS dan PPPK tahun 2024 dalam rangka percepatan penataan tenaga non ASN sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah pengangkatan CPNS paling lambat di bulan Juni 2025 dan PPPK paling lambat di bulan Oktober 2025 agar pelayanan publik di seluruh instansi pusat hingga daerah tidak terganggu. 2. Komisi II DPR RI mendorong BKN melakukan koordinasi dengan 12 kementerian/lembaga, 3 pemerintah provinsi, dan 28 pemerintah kabupaten/kota yang belum	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	e. Kepala Daerah se-Indonesia	dengan agenda persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK, membahas kebijakan BKN tentang mutasi dan promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan kebijakan terkait WFA (<i>work from anywhere</i>), hari Senin, 30 Juni 2024.	<p>mengusulkan NIP PPPK tahun 2024 agar dapat segera melakukan penetapan NIP PPPK.</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan penetapan pertimbangan teknis BKN maupun rekomendasi dari Kemendagri pada proses mutasi dan promosi ASN dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja berdasarkan sistem merit sesuai aturan yang berlaku agar jabatan ASN yang kosong dapat segera terisi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal.</p> <p>4. Komisi II DPR RI memandang pertimbangan teknis (pertek) tetap diperlukan untuk menjamin penerapan sistem merit dan pencegahan politisasi ASN, tetapi pelaksanaannya perlu percepatan, penyederhanaan, dan harmonisasi dengan prinsip otonomi daerah agar tidak menjadi penghambat pelayanan publik.</p> <p>5. Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pemerintah memberikan kepastian jenjang karir dan kesejahteraan bagi PPPK, agar tidak hanya berhenti pada status pengangkatan tetapi juga memiliki peluang peningkatan jabatan, penghargaan kinerja, dan pengembangan kompetensi secara adil setara dengan PNS.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>6. Komisi II DPR RI mendorong BKN meningkatkan sosialisasi kepada pemerintah daerah dalam penggunaan aplikasi digital yang terintegrasi terkait pelaksanaan mutasi ASN.</p> <p>7. Komisi II DPR RI mendukung fleksibilitas kerja ASN melalui kebijakan <i>Flexible Working Arrangement</i> (FWA) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dengan syarat penerapannya tidak menurunkan kualitas pelayanan publik dan disertai mekanisme monitoring kinerja yang terukur.</p>	
3.	<p>a. Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI</p> <p>b. Kepala Kantor Wilayah BPN</p> <p>c. Kepala Kantor Pertanahan</p> <p>d. Kepala Daerah se-Indonesia</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p> <p>c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan, dan Kepala Daerah se-Indonesia, dengan agenda pengawasan legalitas dan hak atas tanah, serta permasalahan tata ruang, hari Selasa, 1 Juli 2024.</p>	<p>1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat integrasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) di seluruh provinsi untuk menjamin kepastian hukum pemanfaatan ruang pesisir, dengan target terukur dan monitoring berkala.</p> <p>2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan pemetaan pulau-pulau kecil terluar dan mempercepat identifikasi pulau yang belum terdata, melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga kedaulatan wilayah perbatasan.</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau dan reklamasi pesisir dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan sistem monitoring terpadu agar tidak terjadi reklamasi ilegal dan segala pemanfaatan pulau</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>yang melanggar hukum maupun yang terindikasi dimiliki asing maupun dikuasai pihak lain secara illegal.</p> <p>4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk melindungi hak masyarakat pesisir secara aktif dalam pemberian hak atas tanah, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.</p> <p>5. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk mendorong revisi regulasi dan pembentukan tim terpadu penataan wilayah pesisir untuk percepatan penanganan konflik batas wilayah, mendukung investasi berkelanjutan, dan melindungi ekosistem.</p> <p>6. Komisi II DPR RI mendorong percepatan integrasi nasional data geospasial antarinstansi, khususnya antara peta bidang tanah (ATR/BPN), batas wilayah administratif (Kemendagri), Badan Informasi Geospasial (BIG), zonasi laut (KKP), dan peta kawasan hutan (KLHK), dalam rangka mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta (Perpres No. 9 Tahun 2016) serta menghindari tumpang tindih kewenangan.</p> <p>7. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk mengirimkan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI kepada Sekretariat Komisi II DPR RI maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Rapat Kerja hari ini.</p>	
4.	a. Menteri Dalam Negeri RI	a. Pelaksanaan undang-undang;	1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Keuangan RI untuk mempercepat penyaluran dana transfer ke daerah (TKD),	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	b. Wakil Menteri Keuangan c. Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI d. Kementerian PPN/Bappenas RI	b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Kerja Panja Evaluasi 4 (empat) DOB Papua di Papua Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kementerian PPN/Bappenas RI, dengan agenda membahas kebijakan transfer Dana Otonomi Khusus DOB 4 Provinsi di Tanah Papua dan membahas anggaran infrastruktur sarana dan prasarana perkantoran DOB 4 Provinsi di Tanah Papua, hari Rabu, 2 Juli 2025.	baik DAU, DAK, DTI, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan formulasi yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan amanah UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada 4 (empat) DOB di Tanah Papua. 2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum RI merealisasikan pembangunan infrastruktur di 4 (empat) DOB di Tanah Papua melalui alokasi DIPA Kementerian Pekerjaan Umum hingga serapan anggarannya minimal 80% untuk APBN tahun 2025. 3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Kantor Gubernur, DPRP, dan MRP di 4 (empat) DOB di Tanah Papua paling lambat tahun 2028 sebagai prasyarat mutlak untuk menjamin efektivitas birokrasi, kesinambungan pelayanan publik, dan legitimasi pemerintahan di daerah otonom baru. 4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi hingga selesai dan tuntas untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di 4 (empat) Provinsi baru di Tanah Papua.	
5.	a. Pemerintah Daerah b. Kanwil BPN Provinsi	a. Pelaksanaan undang-undang;	Terkait pelayanan pertanahan dan PNPB di Sektor Pertanahan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	c. Kantah Kab/Kota d. Kementerian Dalam Negeri e. Kementerian ATR/BPN	b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung, tanggal 2 – 4 Juli 2025.		
6.	a. Pemerintah Daerah b. Kanwil BPN Provinsi c. Kantah Kab/Kota d. Kementerian Dalam Negeri e. Kementerian ATR/BPN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tanggal 3 – 5 Juli 2025.	Terkait pelayanan pertanahan dan PNBPN di Sektor Pertanahan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi III DPR RI ke Negara Inggris tanggal 24 s.d 29 Juni 2025	Dalam rangka mendapatkan masukan terkait Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana.	--
2.		Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Barat tanggal 2 s.d 4 Juli 2025 dengan: 1. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat 2. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat 3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat 4. Akademisi Universitas Padjadjaran (UNPAD)	Menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).	
3.		Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 s.d 4 Juli 2025 dengan: 1. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) D.I Yogyakarta 2. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) D.I Yogyakarta 3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) D.I Yogyakarta 4. Akademis Universitas Gadjah Mada (UGM)	Menerima masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).	
4.		Rapat Kerja Komisi III DPR RI tanggal 8 Juli 2025 dengan: 1. Menteri Hukum Republik Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia 2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia	Membahas : 1. Penjelasan Pimpinan Komisi III DPR atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Pandangan Pemerintah atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 3. Membahas Jadwal dan Rencana Kerja; 4. Penyerahan DIM dari Pemerintah ke Komisi III DPR RI; 5. Pembentukan Panja 6. Lain-lain.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diwakili oleh Astamarena Kapolri 2. Jaksa Agung Republik Indonesia diwakili oleh Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan	Rapat Kerja Komisi III DPR RI tanggal 7 Juli 2025 membahas: 1. RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026. 2. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	Rapat Kerja ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Astamarena Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024. 2. Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp109.672.114.373.000,- (<i>seratus sembilan triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp63.795.421.525.000,- (<i>enam puluh tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp173.467.535.898.000,- (<i>seratus tujuh puluh tiga triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar</i>	--

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).</i></p> <p>3. Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8.965.043.307.000,- (<i>delapan triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp18.529.114.821.000,- (<i>delapan belas triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar seratus empat belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp27.494.158.128.000,- (<i>dua puluh tujuh triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah</i>).</p> <p>4. Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan pagu indikatif anggaran tahun 2026 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.</p>	
2.	1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 3. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	Rapat Kerja Komisi III DPR RI tanggal 8 Juli 2025 membahas: 1. RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026. 2. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	Rapat Kerja ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024. 2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10.878.363.740.000,- (<i>sepuluh triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Rp7.678.177.298.000,- (<i>tujuh triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp18.556.541.038.000,- (<i>delapan belas triliun lima ratus lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp260.884.542.000,- (<i>dua ratus enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp130.979.800.000,- (<i>seratus tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp391.864.342.000,- (<i>tiga ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah</i>).</p> <p>4. Komisi III DPR RI dapat menyetujui usulan pergeseran anggaran pagu indikatif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2026 dari Program Penanganan Perkara ke Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.952.350.000,- (<i>tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah</i>).</p> <p>5. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Komisi Yudisial Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp82.635.177.000,- (<i>delapan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp277.340.357.000,- (<i>dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp359.975.534.000,- (<i>tiga ratus lima puluh</i></p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).</i></p> <p>6. Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan pagu indikatif anggaran tahun 2026 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.</p>	
3.	<ol style="list-style-type: none"> Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kepala Badan Narkotika Nasional 	<p>Rapat kerja Komisi III DPR RI tanggal 9 Juli 2025 membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 	<p>Rapat Kerja ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp878.039.701.000,- (<i>delapan ratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp1.347.969.819.000,- (<i>satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp2.226.009.520.000,- (<i>dua triliun dua ratus dua puluh enam miliar sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah</i>). Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp199.025.363.000,- (<i>seratus sembilan puluh sembilan miliar dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp991.945.136.000,- (<i>sembilan ratus sembilan puluh satu miliar</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)</i> sehingga menjadi sebesar Rp1.190.970.499.000, <i>(satu triliun seratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)</i>.</p> <p>4. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.015.832.652.000,- <i>(satu triliun lima belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)</i> dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp1.140.833.494.000,- <i>(satu triliun seratus empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)</i> sehingga menjadi sebesar Rp2.156.666.146.000,- <i>(dua triliun seratus lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)</i>.</p> <p>5. Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan pagu indikatif anggaran tahun 2026 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<p>1. Dr. Patrialis Akbar S.H, M.H.</p> <p>2. Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M</p> <p>3. Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si</p>	RDPU Komisi III DPR RI pada tanggal 4 Juli 2025.	Penyampaian Pandangan dan Masukan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional dan Daerah/Lokal.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Kehutanan Komisi IV dengan Asosiasi dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Juni 2025, pukul 10.00 WIB.	Menerima aspirasi, masukan dan pandangan Asosiasi terhadap Konsep RUU Kehutanan.	-
2	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Kehutanan Komisi IV dengan Pakar/Akademisi dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Juni 2025, pukul 14.00 WIB.	Mendapatkan masukan dan berdiskusi dengan para Pakar/Akademisi terhadap Konsep RUU Kehutanan.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Pertanian	Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 7 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026; dan 2. Isu-isu aktual lainnya	
2.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 7 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026; dan 2. Isu-isu aktual lainnya	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Badan Pangan Nasional	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 7 Juli 2025, pukul 15.00 WIB.	1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026 (hasil pembahasan akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi); dan 2. Isu-isu aktual lainnya.	
4.	Badan Karantina Indonesia	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 7 Juli 2025, pukul 16.00 WIB.	1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026 (hasil pembahasan akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi); dan 2. Isu-isu aktual lainnya.	
5.	Menteri Kehutanan	Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 8 Juli 2025 (menyesuaikan waktu rapat paripurna).	1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026; dan 2. Isu-isu aktual lainnya	
6.	Eselon I Kementerian Pertanian	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 8 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	Tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 7 Juli 2025	
7.	Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan 8 Juli 2025, pukul 15.00 WIB.	Tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 7 Juli 2025	
8.	Eselon I Kementerian Kehutanan	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 9 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	Tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 7 Juli 2025	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI	Rapat Internal Komisi IV DPR RI dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 (setelah rapat paripurna).	Acara: 1. Penyusunan dan Penetapan Program Kerja Komisi IV DPR RI Masa	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025. 2. Lain-lain	
2.	Dewan Presidium Pusat Forum Komunikasi Nelayan Nusantara (FKNN)	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, pukul 14.00 WIB.	Menerima masukan terkait: 1. Pencemaran lingkungan wilayah penangkapan ikan; 2. Tentang migrasi perijinan dari daerah ke pusat oleh kapal-kapal berukuran <30GT; dan 3. Penerapan pemasangan alat VMS untuk penerbitan Surat Layak Operasi (SLO) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.	
3.	Badan Pangan Nasional	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 (setelah rapat paripurna).	Membahas: 1. Pelaksanaan Program Kerja Triwulan I dan II; serta 2. Pembukaan Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga.	
4.	Badan Karantina Indonesia	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025.	Membahas: 1. Pelaksanaan Program Kerja Triwulan I dan II; serta 2. Pembukaan Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga.	
5.	Menteri Pertanian	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	Membahas: 1. Pelaksanaan Program Kerja Triwulan I dan II; serta 2. Pembukaan Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.	Membahas: 1. Pelaksanaan Program Kerja Triwulan I dan II; 2. Peninjauan Pulau di Anambas; serta 3. Pembukaan Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga.	
7.	Menteri Kehutanan	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025, pukul 16.00 WIB.	Membahas: 1. Pelaksanaan Program Kerja Triwulan I dan II; 2. Tindak lanjut kunjungan kerja reses; serta 3. Pembukaan Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga.	
8.	1. Gubernur Jawa Barat; 2. Bupati Subang; 3. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kementerian KP; 4. Kepala Badan Pangan Nasional; 5. Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan/ID FOOD; 6. Kepala Balai Diklat Aparatur Kementerian KP; 7. Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; dan 8. Kadis Perikanan Kab. Subang	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 ke Sukamandi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada 3-5 Juli 2025.	1. Meninjau lokasi Pengembangan Percontohan <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV berbasis UPT dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi tepat guna; serta 2. Meninjau dan Diskusi di Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan.	
9.	1. Walikota Madiun; 2. Kepala Bapanas; 3. Dirjen Perkebunan, Kementan; 4. Direksi ID FOOD;	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 ke Madiun, Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada 3-5 Juli 2025.	Peninjauan dan Diskusi mengenai Peningkatan Produksi Tebu dan Gula dalam Mendukung Swasembada Gula dan	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	5. Direksi PT Perkebunan Nusantara III; 6. Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero); 7. Direksi Perum BULOG; 8. General Manager Pabrik Gula Rejo Agung Baru; 9. Kepala Pusat Penelitian Perkebunan Gula (P3GI); 10. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur; 11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur; 12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun; 13. Penyuluh Pertanian; dan 14. Petani Tebu.		Peningkatan Kesejahteraan Petani Tebu di Pabrik Gula Rejo Agung Baru.	
10.	1. Walikota Surabaya; 2. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; 3. Kepala Badan Karantina Indonesia; 4. Direksi ID FOOD/PT. Berdikari; 4. Kepala Balai Besar Veteriner Farma, Surabaya; 5. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur; serta 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 ke Surabaya dilaksanakan tanggal 4-6 Juli 2025.	Meninjau dan melakukan pertemuan di Balai Besar Veteriner Farma, Pusvetma, Surabaya.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. BMKG 2. BNPP/Basarnas	RDP dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025.	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN T.A 2025 s.d. Juli 2025. 2. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T.A 2026.	
3.	1. Menteri Desa dan PDTT 2. Menteri Transmigrasi	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025.	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN T.A 2025 s.d. Juli 2025. 2. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T.A 2026.	
4.	Menteri Perhubungan	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025.	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN T.A 2025 s.d. Juli 2025. 2. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T.A 2026.	
5.	Menteri Pekerjaan Umum	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025.	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN T.A 2025 s.d. Juli 2025. 2. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T.A 2026.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kementerian Perhubungan - Dirjen Perhubungan Darat - Dirjen Perhubungan Udara 2. Kementerian Pekerjaan Umum - Dirjen Bina Marga	Kunker Spesifik Jalan Tol dilaksanakan pada tanggal 26-28 Juni 2025.	1. Meninjau Tol Jakarta – Tangerang – Merak, Provinsi Banten. 2. Meninjau Tol Jakarta – Cikampek – Cipularang, Provinsi Jawa Barat. 3. Meninjau Tol Harbour Road, Tol Sedyatmo (Bandara Soeta) – Kunciran – Serpong.	
2.	Kementerian Transmigrasi	Rapat Kerja dilaksanakan pada Senin, 30 Juni 2025.	Pengelolaan dan status kawasan transmigrasi yang masuk kawasan hutan.	
3.	Kementerian Perhubungan	Rapat Kerja dilaksanakan pada Senin, 30 Juni 2025.	Membahas Permasalahan Transportasi Berbasis Aplikasi/Online.	
4	1. Inisiatif Strategi Transportasi (INSTRANS). 2. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 3. <i>Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)</i>	RDPU dilaksanakan pada 1 Juli 2025.	Membahas SPM Jalan Tol.	
5.	1. Universitas ITB 2. Universitas Indonesia 3. Universitas Hasanudin 4. Unika Sugiya Pratama	RDPU dilaksanakan pada 2 Juli 2025.	Membahas SPM Jalan Tol.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	1. Kementerian Perhubungan: <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Laut - Ditjen Udara - Ditjen Darat - PT. Pelindo - PT. ASDP Indonesia Ferry 2. Kementerian PU : <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Bina Marga - Ditjen Ditjen SDA - BPJT - PT. Waskita Sriwijaya Toll 3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Kementerian Desa dan PDT 5. Kementerian Transmigrasi 6. BMKG 7. Basarnas	Kunker Spesifik Dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juli 2025.	1. Provinsi Sumatera Selatan (Ruas Jalan Tol Palembang – Kayu Agung). 2. Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Padang Pariaman). 3. Provinsi Bengkulu (Peninjauan Pelabuhan Pulau Enggano).	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perlindungan Konsumen	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja RUU tentang Perlindungan Konsumen dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2025 pukul 13.00 WIB.	1. Penjelasan Badan Keahlian tentang NA dan draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Penyerahan NA dan draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	
2.		Rapat Intern Panja RUU tentang Perlindungan Konsumen dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2025 pukul 14.30 WIB.	Membahas rencana kerja Panja.	
3.	RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	RDP Panja RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.	Penjelasan Badan Keahlian tentang NA dan draft RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian BUMN	Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian BUMN TA 2024; dan 2. Pembahasan RKA dan RKP Kementerian BUMN TA 2026.	
2.	1. Kepala BP Batam 2. Kepala BPKS Sabang 3. Ketua KPPU	RDP Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada Rabu 9 Juli pukul 10.00 WIB dengan: 1. Kepala BP Batam 2. Kepala BPKS Sabang 3. Ketua KPPU	1. Pembahasan Laporan Keuangan BP Batam, BPKS Sabang, dan KPPU TA 2024; 2. Pembahasan RKP dan RKA BP Batam, BPKS Sabang, dan KPPU TA 2026.	
3.	Kementerian Koperasi	Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dilaksanakan pada hari Rabu 9 Juli pukul 14.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Koperasi TA 2024; dan 2. Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Koperasi TA 2026.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pimpinan Komisi VI DPR RI	Rapat Pimpinan Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu 25 Juni, pukul 09.30 WIB.	Penyusunan dan Pembahasan Program Kerja Komisi VI DPR RI pada MP IV TS 2024-2025.	
2.	Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI	Rapat Intern Komisi VI DPR RI dilaksanakan Rabu 25 Juni, pukul 10.00 WIB.	Pembahasan dan Penetapan Program Kerja Komisi VI DPR RI MP IV TS 2024-2025.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	1. Pengurus Pusat Persatuan Pensiunan Pos Indonesia; 2. Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya; dan 3. Paguyuban Pensiunan PT. Pertani.	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka pengaduan masyarakat. dilaksanakan pada hari Senin, 30 Juni 2025, pukul 10.00 WIB.	Permasalahan mengenai: 1. Perubahan skema tunjangan dan sumbangan menjadi Bantuan Pensiunan; 2. Hak uang pensiun Pensiunan Jiwasraya; dan 3. Pembubaran Dana Pensiun PT. Pertani.	
4.	1. Dirut PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/ (Indonesia Re) dan Subholding (PT. Asuransi ASEI Indonesia dan PT. Reasuransi Syariah Indonesia); 2. Dirut PT. ASABRI (Persero); dan 3. Dirut PT. TASPEN (Persero)	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dalam rangka fungsi pengawasan dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI; 2. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024; 3. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025; dan 4. Lain-lain.	
5.	Dirut PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dalam rangka fungsi pengawasan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Perkenalan Dirut dan jajaran Direksi; 2. Evaluasi kinerja Perusahaan Triwulan 1 Tahun 2025; 3. Aksi Korporasi dan <i>roadmap</i> pengembangan perusahaan; 4. Lain-lain.	
6.	1. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)/ (PTPN); 2. PT. Perkebunan Nusantara IV (PalmCo). 3. PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) / ID FOOD; 4. PT. Garam 5. PT. Pertamina Geothermal Energy; dan 6. PT. Pertamina Power Indonesia.	Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis – Sabtu, 3 – 5 Juli 2025 ke: 1. Sumatera Utara (Medan). 2. Jawa Timur (Surabaya/Madura). 3. Sulawesi Utara (Manado/Tomohon).	1. Strategi Pengembangan Industri Minyak Kelapa Sawit Nasional. 2. Pembahasan Operasional PT Garam serta Pengembangan Tata Kelola Garam Nasional. 3. Peninjauan Sumber Energi Geothermal Lahendong dan Pengembangan EBT Nasional.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Perindustrian RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Senin 7 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat APBN 2024; 2. Pembahasan RKAL dan RKP 2026.	
2.	Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Selasa 8 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat APBN 2024; 2. Pembahasan RKAKL 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	
3.	Menteri Pariwisata RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu 9 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat APBN 2024; 2. Pembahasan RKAKL 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	
4.	Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu 9 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat APBN 2024; 2. Pembahasan RKAKL 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pimpinan Komisi VII DPR RI	Rapat Pimpinan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Juni 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Penyusunan Program Kerja Komisi VII DPR RI. 2. Lain-lain.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Pimpinan dengan Anggota Komisi VII DPR RI	Rapat Internal dilaksanakan pada hari Rabu 25 Juni 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pembahasan Program Kerja Komisi VII DPR RI. 2. Lain-lain.	
3.	Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Kamis 26 Juni 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025; 2. Lain-lain.	
4.	1. Gubernur Provinsi Bali 2. Kementerian Pariwisata RI 3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Kamis, 1 s.d. 3 Juli 2025.	Terkait Pariwisata di Provinsi Bali.	
5.	Menteri UMKM RI dengan menghadirkan Dirut Bank Himbara dan BSI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Selasa 1 Juli 2025, pukul 15.00 WIB.	1. Pembahasan progres Penyaluran KUR kepada UMKM; 2. Lain-lain.	
6.	Menteri Perindustrian RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional; 2. Lain-lain.	
7.	Plt. Kepala BSN	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Laporan pelaksanaan Program Kerja Tahun 2025; 2. Lain-lain.	
8.	Menteri Pariwisata RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Kamis 3 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Laporan pelaksanaan Program Kerja Tahun 2025; 2. Lain-lain.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	1. LKPP TVRI 2. LKPP RRI 3. LKBN Antara	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis 3 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Laporan pelaksanaan Program Kerja Tahun 2025; 2. Lain-lain.	
10.	1. PT. Wuling Indonesia, Di Kab Bekasi (1 TIM) 2. Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) DI SERPONG BANTEN	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Minggu, 4 s.d. 6 Juli 2025.	Terkait fungsi pengawasan pada bidang Perindustrian.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Panja Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI	Rapat Internal Panja Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 30 Juni 2025.	1. Menyusun Program Kerja Masa Pesidangan IV Tahun Sidang 2024-2025; 2. Pembahasan Draft RUU Hasil Harmonisasi dan Sinkronisasi Baleg.	
2.	Panja PKH Komisi VIII DPR RI	Rapat Internal Panja PKH Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 30 Juni 2025.	Menyusun Program Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	-	Rapat Pimpinan Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025.	Menyusun Program Kerja Komisi VIII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.	
2.	-	Rapat Internal Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025.	Menyusun Program Kerja Komisi VIII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.	
3.	-	Rapat Internal Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Juni 2025.	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/2025 M Tahap I dan Tahap II.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	-	Rapat Internal Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Juni 2025.	Pembahasan Mekanisme Penyusunan <i>Fit dan Proper Test</i> Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional.	
5.	Ny. Yatmi, Wakil Direktur PT Jaya Real Property Tbk, dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2025.	Audiensi mengenai pembongkaran tanah wakaf girik a.n. Alin Bin Embing dan belasan kuburan di Bintaro <i>Exchange</i> .	
8.	Menteri Sosial RI (Sesi I)	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025.	Pembahasan Hasil Rekonstruksi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025.	
9.	Menteri Sosial RI (Sesi II)	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024; 2. Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga per Juni Tahun 2025; 3. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga serta Rencana dan Program Kementerian/Lembaga Tahun 2026.	
10.	Kepala BP Haji Republik Indonesia	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025.	Pembahasan Hasil Rekonstruksi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025.	
11.	Kepala BPJPH RI	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025.	Pembahasan Hasil Rekonstruksi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025.	
12.	Menteri Agama R	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan I dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025.	Pembahasan Hasil Rekonstruksi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025.	
13.	1. Menteri Agama RI; 2. Menteri Sosial RI;	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025.	1. Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024; 2. Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga per Juni 2025;	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI; 4. Kepala BNPB; 5. Kepala BPJPH; 6. Kepala BP Haji.		3. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga serta Rencana Kerja dan Program Kementerian/Lembaga Tahun 2026.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Asrama Haji Embarkasi Propinsi Kalimantan Timur	Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 2-4 Juli 2025.	Berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Asrama Haji Embarkasi Balikpapan maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: 1) Pengelolaan Asrama Haji Embarkasi Balikpapan dapat ditingkatkan menjadi pusat wisata religi di wilayah Kaltim mengingat besarnya minat masyarakat untuk mengunjungi miniatur perhajian dan penginapan yang murah. 2) Membangun akses wisata pantai di belakang Asrama Haji Embarkasi Balikpapan mengingat posisi Asrama Haji yang berada di bibir pantai yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ekosistem wisata religi di kawasan tersebut.	
2.	Industri Park Sidoarjo (HIPS) Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur	Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 2-4 Juli 2025.	Berdasarkan hasil kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kawasan Industri Halal di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur maka dapat dicatat beberapa Rekomendasi sebagai berikut:	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none">1. Agar BPJPH membuat aturan yang mempermudah urusan dalam proses sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha2. Melibatkan kalangan akademisi dan tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam proses percepatan target sertifikasi halal di Provinsi Jawa Timur.3. Membuat Lembaga Pemeriksa Halal (LPK) di setiap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berkaitan dengan Produk Makanan, Kosmetik, Obat, Tekstil dan Penggunaan Lainnya. sehingga kedepannya, kawasan tersebut dapat memiliki sumbangsih besar bagi percepatan produk halal di Indonesia.4. Menekankan agar kiranya kawasan industri halal ini harus mendapatkan banyak insentif fiskal, baik itu bea masuk atau bea keluar barang, pembebasan pajak, dan lain-lain. Agar diharapkan produk-produk halal yang dihasilkan dapat bersaing pada dunia global dan distribusi ke masyarakat tanpa kendala5. Mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar membentuk Deputi Industri Halal, pada bagan struktur kelembagaan BPJPH. Hal ini dapat memfokuskan program BPJPH dalam percepatan produk halal pada kawasan industri.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Pimpinan Komisi IX DPR RI	Rapat Pimpinan Komisi IX DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025, pukul 11.00 WIB dengan agenda: 1. Penyusunan Program Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025. 2. Lain-lain.	Rapat tertutup.	
2.	Rapat Intern Komisi IX DPR RI	Rapat Intern Komisi IX DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025, pukul 13.00 WIB dengan agenda: 1. Pembahasan dan Penetapan Program Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025. 2. Lain-lain.	Rapat tertutup.	
3.	Rapat Kerja dengan: 1. Menteri Kesehatan 2. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Penyampaian Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 oleh Kementerian Kesehatan RI, termasuk tren nasional dan daerah dalam prevalensi <i>stunting</i> , <i>wasting</i> , dan gizi buruk serta	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Rapat Dengar Pendapat dengan: 1. Kepala Badan POM RI 2. Kepala Badan Gizi Nasional		<p>provinsi/kabupaten prioritas yang mengalami peningkatan kasus.</p> <p>2. Evaluasi Program Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian intervensi spesifik dan sensitif oleh Kementerian Kesehatan RI, BKKBN, dan BGN. • Integrasi pelaksanaan program oleh PKB/PLKB, Puskesmas, dan Posyandu. • Tantangan pelaksanaan di lapangan dan strategi percepatan yang diperlukan. <p>3. Penguatan Standar Gizi dan Pengawasan Produk Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan peran dan mandat masing-masing K/L dalam penetapan standar gizi nasional. • Evaluasi pengawasan dan regulasi peredaran makanan olahan oleh Badan POM RI, termasuk makanan anak dan suplemen. <p>4. Penerapan standar gizi nasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).</p>	
4.	<p>Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI</p> <p>RDPU dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Disiplin Profesi (MDP) 2. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 3. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 4. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) 	Rapat kerja dan RDPU dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	Membahas penyelesaian dugaan malapraktik di fasilitas pelayanan Kesehatan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Rapat kerja dan RDP dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kebutuhan infrastruktur dan instruktur pelatihan Balai Besar Latihan Kerja di setiap provinsi untuk meningkatkan kompetensi dan menghasilkan tenaga kerja yang handal dan berdaya saing. 2. Percepatan sertifikasi kompetensi profesi untuk tenaga kerja oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 	
6.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan dilaksanakan pada hari Kamis-Sabtu, 3-5 Juli 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poltekkes Palembang, Provinsi Sumatera Selatan; 2. Poltekkes Semarang, Provinsi Jawa Tengah; 3. Poltekkes Denpasar, Provinsi Bali. 	
7.	Menteri Ketenagakerjaan RI	Rapat Kerja dengan agenda Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026 dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	Rapat Tertutup.	
8.	Kepala Badan POM	Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026 dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	Rapat Tertutup.	
9.	Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI	Rapat Kerja dengan agenda Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026 dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	Rapat Terutup.	
10.	Menteri Kesehatan RI	Rapat Kerja dengan agenda Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026 dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.	Rapat Tertutup.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Perpustakaan Nasional RI	RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustnas dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Juli 2025, pukul 13.00 WIB. Agenda: 1) Pemaparan Anggaran Hasil Relaksasi APBN TA 2025; 2) Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026.	(Rapat Tertutup) 1. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menkeu RI dan Menteri PPN/Bappenas No. S- 356/MK.02/2025 dan No. B- 383/D.9/PP.04.03/05/2025 tanggal 15 Mei 2025, Pagu Indikatif Perpustnas RI TA 2026 sebesar Rp266.699.537.000 (<i>Dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah</i>). 2. Terhadap Pagu Indikatif Perpustnas TA 2026, Komisi X DPR RI menyampaikan catatan sebagai berikut: a. Mendorong Perpustnas RI untuk mengajukan usulan tambahan pagu indikatif dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026 secara lebih realistis dan proporsional, sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan dalam upaya mengatasi berbagai kendala literasi nasional. b. Mendukung usulan Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non-Fisik sebagaimana kesimpulan/keputusan No. 5 tersebut untuk mendukung pembangunan sarana-prasarana fisik dan program perpustakaan daerah.	
2.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	(Rapat Tertutup) 1. Komisi X DPR RI menerima penjelasan dari Kemendikdasmen terhadap pagu Indikatif Kemendikdasmen RI pada RAPBN TA 2026	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Juli 2025, pukul 15.00 WIB. Agenda: 1) Pemaparan Anggaran Hasil Relaksasi APBN TA 2025, 2) Penyikapan atas Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang Pendidikan Dasar Tanpa Dipungut Biaya, dan 3) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP Tahun 2026.	sebesar Rp33.651.752.088.000 (<i>Tiga puluh tiga triliun enam ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah segera membentuk dan menjalankan rencana aksi nasional penerapan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang Pendidikan Dasar Tanpa Dipungut Biaya, serta mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan pemenuhan anggaran untuk penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun.	
3.	Kementerian Kebudayaan	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025, pukul 10.00 WIB. Agenda: 1) Pemaparan Anggaran Hasil Relaksasi APBN TA 2025, dan 2) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	1. Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga, pagu Indikatif Kementerian Kebudayaan pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp827.391.821.000 (<i>Delapan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI dan Kemenbud RI sepakat akan melakukan pendalaman pada RDP (konsinyasi) dalam waktu dekat, dengan catatan: a. Dalam merealisasikan kebijakan dan program bidang kebudayaan perlu melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemda. b. Perlunya advokasi dan/atau pembinaan terhadap permasalahan kebudayaan di daerah. c. Seluruh program dan kegiatan harus merujuk kepada UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. d. Setiap eselon I menyampaikan data secara rinci mengenai permasalahan dan perkembangan bidang kebudayaan tahun 2024 dan 2025, yang disandingkan dengan rencana tahun 2026, serta	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			menyampaikan argumentasi secara komprehensif terkait usulan tambahan sebesar Rp4,9 Triliun. 3. Komisi X DPR RI mendesak Kemenbud RI untuk segera melakukan uji publik penulisan sejarah Indonesia dengan melibatkan seluas-luasnya pemangku kepentingan di bidang sejarah.	
4.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025, pukul 13.00 WIB. Agenda: 1) Pemaparan Anggaran Hasil Relaksasi APBN TA 2025, dan 2) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	(Rapat Tertutup) 1. Berdasarkan Surat Menteri PPN//Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, pagu Indikatif Kemdiktisaintek RI pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp55.452.489.382.000 (<i>Lima puluh lima triliun empat ratus lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI dan Kemdiktisaintek RI sepakat akan melakukan pendalaman pada RDP (konsinyasi) dalam waktu dekat, dengan catatan: a. Kemdiktisaintek RI menyampaikan penjelasan komprehensif mengenai implementasi program kerja sebagai turunan arah kebijakan Diktisaintek “Berdampak”. b. Setiap eselon I menyampaikan data secara rinci mengenai perkembangan dan permasalahan diktisaintek 2024 dan 2025 yang disandingkan dengan rencana tahun 2026. c. Setiap eselon I menyampaikan data dan argumentasi secara komprehensif terkait usulan tambahan sebesar 12,5 Triliun	
5.	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala BRIN dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025 pukul 15.00 WIB. Agenda: 1) Pemaparan Anggaran Hasil Relaksasi APBN TA 2025, dan 2) Pembahasan RKA-K/L TA	(Rapat Tertutup) 1. Kepala BRIN menyampaikan bahwa Pagu Indikatif BRIN Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp4.271.743.006.000 (<i>Empat triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI mendorong BRIN untuk menyusun usulan tambahan pagu indikatif dalam RAPBN 2026 secara realistis dan proporsional, berbasis kebutuhan prioritas riset serta tantangan inovasi nasional,	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan dampak strategisnya, serta mendukung usulan penambahan Dana Abadi Penelitian untuk memperkuat dana kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sehingga mampu menghasilkan temuan baru (inovasi) dan pengembangan ide baru (inovasi).	
6.	Badan Pusat Statistik (BPS)	RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala BPS dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025, pukul 17.00 WIB. Agenda: 1) Pemaparan Anggaran Hasil Relaksasi APBN TA 2025, dan 2) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	(Rapat Tertutup) 1. Kepala BPS menyampaikan bahwa Pagu Indikatif BPS Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp3.692.123.265.000 (<i>Tiga triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI Mendorong BPS untuk merumuskan usulan pagu indikatif TA 2026 berbasis kebutuhan ideal dengan alokasi proporsional antara manajemen dan statistik substantif untuk mendukung kebijakan berbasis data, serta Mendorong BPS untuk mempersiapkan alokasi anggaran yang memadai guna mengantisipasi implementasi UU Statistik yang baru, sehingga kesiapan operasional dan kapasitas kelembagaan dapat terjamin sejak awal.	
7.	Kementerian Kebudayaan	RDP (Konsinyasi) Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Kebudayaan RI dilaksanakan pada hari Minggu, 6 Juli 2025, pukul 18.30 WIB.	(Rapat Tertutup) 1. Berdasarkan penjelasan Sekretaris Jenderal dan para eselon I Kementerian Kebudayaan RI, pagu Indikatif Kementerian Kebudayaan pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp827.391.821.000 (<i>Delapan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI akan mengambil keputusan pada Rapat Kerja dalam waktu dekat, untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI 3. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan paparan RDP/Konsinyasi diperbaiki dengan menambahkan landasan hukum. b. Setiap unit utama perlu memberikan rincian RKP dan RKA secara detail, dan mengintegrasikan program-program kebudayaan dengan pendidikan, serta memperkuat ekosistem termasuk peningkatan SDM Kebudayaan dan tata kelola kebudayaan dengan melibatkan masyarakat secara optimal, c. Program fasilitasi pemajuan kebudayaan (semarak budaya) perlu ditingkatkan sasarannya dengan memperbaiki pengelolaannya, sebagai bagian upaya penguatan kebudayaan daerah 	
8.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	RDP (Konsinyasi) Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	<p>(Rapat Tertutup)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan penjelasan Sekretaris Jenderal dan para Eselon I Kemendikdasmen RI, Pagu Indikatif Kemendikdasmen RI pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp33.651.752.088.000 (<i>Tiga puluh tiga triliun enam ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh delapan ribu</i>). 2. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan untuk penyempurnaan RKP/RKA-KL Pagu Anggaran setiap Eselon I Kemendikdasmen RI pada RAPBN TA 2026 sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> a. Kemendikdasmen RI wajib melakukan akselerasi pemerataan kualitas pendidikan dan mengalokasikan anggaran pendidikan untuk afirmasi daerah 3T dan marginal, serta menyusun perencanaan jangka panjang bagi penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Peraga Edukatif (APE). b. Kemendikdasmen RI melakukan evaluasi menyeluruh dan penyesuaian skala prioritas program pendidikan vokasi, dengan fokus utama pada bidang yang sangat dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri serta kebutuhan wilayah. 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			c. Segera menyelesaikan permasalahan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
9.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Raker Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025 pukul 15.00 WIB. Agenda: 1) Pemaparan Anggaran Hasil Relaksasi APBN TA 2025, dan 2) Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026	(Rapat Tertutup) 1. Kemenpora RI mendapatkan Pagu Alokasi Pasca Relaksasi Tahap 1 sebesar Rp1.577.915.268.000,- (<i>Satu triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI bersama Kemenpora RI sepakat menunda Rapat Kerja pembahasan pada Rabu, 09 Juli 2025 dengan catatan memperbaiki bahan paparan Pagu Indikatif TA 2026 sesuai dengan surat Nomor PR.03.00/6/10.19/SET/VI/2025.	
10.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI	RDP (Konsinyasi) Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025, pukul 13.00 WIB. Agenda: Pendalaman Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	(Rapat Tertutup) 1. Berdasarkan penjelasan Sekretaris Jenderal dan para Eselon I Kemdiktisaintek RI, pagu Indikatif Kemdiktisaintek RI pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp55.452.489.382.000 (<i>Lima puluh lima triliun empat ratus lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut: a. Kemdiktisaintek RI untuk segera mengirimkan kembali surat usulan tambahan anggaran kepada Kemenkeu RI, dengan jumlah usulan tambahan anggaran sebesar Rp12.550.067.012.000 (<i>Dua belas triliun lima ratus lima puluh miliar enam puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah</i>). b. Kemdiktisaintek RI menjelaskan secara operasional mengenai Diktisaintek Berdampak terhadap keluaran program dan kegiatan.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Kemdiktisaintek RI memastikan alokasi anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, meninjau kembali persyaratan untuk mendapatkan KIP Kuliah, memastikan kebijakan sertifikasi dosen diimplementasikan sesuai regulasi, dan menata kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang berdampak negatif terhadap perguruan tinggi swasta, serta akreditasi oleh LAM yang berbiaya tinggi.</p> <p>d. Kemdiktisaintek RI untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai kriteria penentuan sekolah unggul garuda transformasi dan sekolah unggul garuda baru, termasuk keluarannya (<i>output</i>).</p> <p>e. Kemdiktisaintek RI menata ekosistem riset dengan baik, termasuk koordinasi dengan BRIN dan permasalahan zona risiko integritas riset (plagiarisme serta jurnal predator), serta terus menerus melakukan langkah-langkah penataan penyelenggaraan pendidikan oleh PTKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
11.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	RDP (Konsinyasi) Komisi X DPR RI dengan Eselon I BRIN dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025, pukul 16.30 WIB. Agenda: Pendalaman Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	(Rapat Tertutup) Berdasarkan penjelasan Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan para Deputi BRIN, Pagu Indikatif BRIN pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp4.271.743.006.000 (<i>Empat triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ribu rupiah</i>).	
12.	Badan Pusat Statistik	RDP (Konsinyasi) Komisi X DPR RI dengan Eselon I BPS dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025, pukul 19.30 WIB.	(Rapat Tertutup) 1. Berdasarkan penjelasan Kepala BPS, Wakil Kepala BPS dan Eselon I, Pagu Indikatif BPS Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp3.692.123.265.000 (<i>Tiga triliun enam ratus sembilan puluh dua</i>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Agenda: Pendalaman Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	<i>miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).</i> 2. Kepala BPS menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan tambahan anggaran adalah untuk melakukan Sensus Ekonomi Tahun 2026 sesuai amanat UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan untuk mendukung program prioritas nasional.	
13.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Raker Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2025 pukul 11.00 WIB. Agenda: Pemaparan Anggaran Hasil Relaksasi APBN TA 2025. Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.	(Rapat Tertutup) 1. Terhadap realisasi anggaran TA 2025, Kemenpora RI segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi pelaksanaan program di unit kerja yang serapannya di bawah 10%, khususnya Deputi Pembudayaan Olahraga dan Deputi Pengembangan Industri Olahraga. 2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk memastikan program dan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan terfasilitasi, merumuskan alokasi usulan pagu indikatif dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026 secara lebih realistis dan proporsional, melakukan kajian dan inventarisasi anggaran kepemudaan lintas K/L tahun 2025 dan 2026, dan mengambil langkah proaktif dengan berkoordinasi bersama Kemenkeu RI dan Bappenas RI, untuk menyiapkan data pendukung berbasis kinerja, serta memanfaatkan dukungan politik di Komisi X dan Badan Anggaran DPR RI. 3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI melakukan langkah-langkah koordinasi dan menyiapkan kajian agar pembiayaan infrastruktur olahraga nasional harus dikembalikan ke Kemenpora RI agar pengelolaan, pengembangan, dan pemerataan fasilitas olahraga di seluruh Indonesia berjalan lebih terarah, terukur, dan efektif sesuai mandat kelembagaan.	
14.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	RDP Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2025,	(Rapat Tertutup) Berdasarkan penjelasan Sesmenpora, Pagu Indikatif pada RAPBN TA 2026 sebesar Rp248.716.530.000 (<i>Dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah</i>).	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		pukul 13.00 WIB. Agenda: Pendalaman Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026.		

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Komisi X DPR RI	Rapat Intern Komisi X DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2025, pukul 11.00 WIB Agenda: Penetapan Pimpinan Komisi X DPR RI Periode 2024—2029.	(Rapat Tertutup) Berdasarkan Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 293/EXT-FPKS/DPR RI/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025, perihal Perubahan Penugasan Anggota FPKS DPR RI di Alat Kelengkapan Dewan, ditetapkan Sdri. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. (A-450) sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menggantikan Sdr. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos. (A-457).	
2.	Komisi X DPR RI	Rapat Intern Komisi X DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2025 pukul 11.30 WIB Agenda: Menyusun program kerja (fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan) Komisi X DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024 - 2025;	(Rapat Tertutup).	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> Rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024 - 2025; Laporan kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024--2025; Lain-lain. 		
3.	Kementerian Kebudayaan	Kunker Spesifik Bidang Kebudayaan (Penulisan Sejarah Indonesia dalam pandangan akademisi, sejarawan dan budayawan) Komisi X DPR RI pada tanggal 3—5 Juli 2025. Universitas Diponegoro Provinsi Jawa Tengah.	Peserta menyampaikan sejumlah pandangan kritis dan masukan strategis antara lain (1) penulisan sejarah Indonesia masih perlu dilakukan uji publik secara intensif; (2) menghapus absolutisme dalam penulisan sejarah, dimana penulisan buku sejarah oleh Kemenbud ini hanya sebagai trigger untuk menulis buku-buku sejarah lainnya; (3) perlu penegasan spektrum penulisan buku sejarah dalam pencantuman kurun waktu tahun; (4) penulisan sejarah sangat diperlukan fakta-fakta sejarah yang representatif, baik dari sisi wilayah maupun peristiwa per kasus dari kelompok marginal; (5) proses penulisan harus dilakukan secara hati-hati, tidak tergesa-gesa dan dengan pendekatan yang inklusif terhadap seluruh elemen masyarakat.	
		Kunker Spesifik Bidang Kebudayaan (Penulisan Sejarah Indonesia dalam pandangan akademisi, sejarawan dan budayawan) Komisi X DPR RI pada tanggal 3—5 Juli 2025. Universitas Hasanudin, Provinsi Sulawesi Selatan	Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Kebudayaan RI untuk melaksanakan proses penulisan Sejarah Indonesia secara objektif, transparan, partisipatif, holistik, dan inklusif. Proses ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif serta melibatkan uji publik secara luas dengan partisipasi aktif dari kalangan akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan, guna memastikan akurasi dan keberagaman perspektif dalam narasi sejarah bangsa.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Kunker Spesifik Bidang Kebudayaan (Penulisan Sejarah Indonesia dalam pandangan akademisi, sejarawan dan budayawan) Komisi X DPR RI pada tanggal 3—5 Juli 2025. Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Barat	Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Kebudayaan RI untuk melaksanakan proses penulisan Sejarah Indonesia secara objektif, transparan, partisipatif, holistik, dan inklusif. Proses ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif serta melibatkan uji publik secara luas dengan partisipasi aktif dari kalangan akademisi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan termasuk perempuan dan kaum marginal lainnya.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Menteri Keuangan; 2. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 3. Gubernur Bank Indonesia; dan 4. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025 dengan agenda: 1. Pengantar mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026; 2. Pembentukan 3 (tiga) Panitia Kerja (Panja): a) Panja Pertumbuhan; b) Panja Penerimaan; dan c) Panja Defisit.	Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Inddonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun 2026. 2. Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melanjutkan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) yang dibagi menjadi (tiga) yaitu: a) Panitia Kerja (Panja) Panja Pertumbuhan; b) Panitia Kerja (Panja) Penerimaan; dan c) Panitia Kerja (Panja) Defisit.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian PPN/Kepala Bappenas; 3. Bank Indonesia; dan 4. Otoritas Jasa Keuangan	Rapat Panja Pertumbuhan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2025 dengan agenda Pembahasan Panja Pertumbuhan.	Tertutup.	
3.	1. Kementerian Keuangan; dan 2. Kementerian PPN/Kepala Bappenas;	Rapat Panja Penerimaan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2025 dengan agenda Pembahasan Panja Penerimaan.	Tertutup.	
4.	1. Kementerian Keuangan; dan 2. Bank Indonesia;	Rapat Panja Defisit dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2025 dengan agenda Pembahasan Panja Defisit.	Tertutup.	
5.	1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian PPN/Kepala Bappenas; 3. Bank Indonesia; dan 4. Otoritas Jasa Keuangan	Rapat Panja Pertumbuhan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 dengan agenda Pembahasan Panja Pertumbuhan.	Tertutup.	
6.	1. Kementerian Keuangan; dan 2. Kementerian PPN/Kepala Bappenas;	Rapat Panja Penerimaan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 dengan agenda	Tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																																			
		Pembahasan Panja Penerimaan.																																					
7.	1. Menteri Keuangan; 2. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 3. Gubernur Bank Indonesia; dan 4. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 dengan agenda Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan, menyepakati:</p> <p>1. Besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2026, sebagai berikut:</p> <table><tr><th>NO</th><th>INDIKATOR</th><th>BESARAN</th><th>HASIL PANJA</th><th>KEPUTUSAN RAPAT KERJA</th></tr><tr><td colspan="3">ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)</td><td>5,2 – 5,8</td><td>5,2 – 5,8</td><td>5,2 – 5,8</td></tr><tr><td>2</td><td>Inflasi (% YoY)</td><td>1,5 – 3,5</td><td>1,5 – 3,5</td><td>1,5 – 3,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Nilai Tukar Rupiah (Rupiah/ 1 US Dollar)</td><td>16.500 – 16.900</td><td></td><td>16.500 – 16.900</td></tr><tr><td>4</td><td>Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)</td><td>6,6 – 7,2</td><td></td><td>6,6 – 7,2</td></tr><tr><td colspan="3">TARGET PEMBANGUNAN</td><td></td><td></td></tr></table>	NO	INDIKATOR	BESARAN	HASIL PANJA	KEPUTUSAN RAPAT KERJA	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO					1	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,2 – 5,8	5,2 – 5,8	5,2 – 5,8	2	Inflasi (% YoY)	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	3	Nilai Tukar Rupiah (Rupiah/ 1 US Dollar)	16.500 – 16.900		16.500 – 16.900	4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,6 – 7,2		6,6 – 7,2	TARGET PEMBANGUNAN					
NO	INDIKATOR	BESARAN	HASIL PANJA	KEPUTUSAN RAPAT KERJA																																			
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO																																							
1	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,2 – 5,8	5,2 – 5,8	5,2 – 5,8																																			
2	Inflasi (% YoY)	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5																																			
3	Nilai Tukar Rupiah (Rupiah/ 1 US Dollar)	16.500 – 16.900		16.500 – 16.900																																			
4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,6 – 7,2		6,6 – 7,2																																			
TARGET PEMBANGUNAN																																							

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT					KETERANGAN	
				1	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	4,44 – 4,96	4,44 – 4,96	4,44 – 4,96	
				2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	6,5 – 7,5	6,5 – 7,5	
				3	Kemiskinan Ekstrem (%)	0 – 0,5	0 – 0,5	0 – 0,5	
				4	Gini Rasio (indeks)	0,377 – 0,380	0,377 – 0,380	0,377 – 0,380	
				5	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,57	0,57	0,57	
				6	Indikator Kesejahteraan Petani (indeks)	0,7731	0,7731	0,7731	
				7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95	37,95	37,95	
			a. Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, upaya, kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi Pengeluaran, sisi Produksi, dan Program Pembangunan Daerah, sebagaimana yang dirumuskan dalam Laporan Panja Pertumbuhan Ekonomi (Lampiran I). Laporan Panitia Kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi.						

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>b. Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, upaya, kebijakan, dan program untuk meningkatkan pendapatan negara sebesar 11,71 persen hingga 12,31 persen terhadap PDB, sebagaimana dirumuskan dalam Laporan Panitia Kerja Penerimaan (Lampiran II). Laporan Panja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan Asumsi Makro Tahun 2026.</p> <p>c. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal pada APBN tahun 2026 akan tetap dirancang secara ekspansif, terarah, dan terukur melalui pengelolaan defisit pada kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap PDB yang dilandasi oleh disiplin fiskal, keberanian dalam menetapkan prioritas, serta komitmen menjaga kredibilitas APBN demi terlaksananya kebijakan fiskal yang berkelanjutan (Lampiran III). Laporan Panja Defisit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menetapkan defisit APBN Tahun 2026.</p>	
8.	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025 dengan agenda Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2026.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2026. 2. Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 sebesar Rp764.480.195.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut: (dalam rupiah) 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT			KETERANGAN
			NO	NAMA PROGRAM	ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026	
			1	Perencanaan Pembangunan Nasional	207.704.975.000	
			2	Dukungan Manajemen	556.775.220.000	
			Total		764.480.195.000	
			Berdasarkan fungsi Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut: (dalam rupiah)			
			FUNGSI		ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026	
			055 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS		764.480.195.000	
			01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM			
				Program Perencanaan Pembangunan Nasional	207.704.975.000	
				Program Dukungan Manajemen	556.775.220.000	
			3. Komisi XI DPR RI mendukung usulan Kementerian PPN/Bappenas mengajukan tambahan anggaran dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2026 sebesar Rp2.013.528.723.777,00 (Dua Triliun Tiga Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:			
			Uraian		Alokasi Tambahan Anggaran 2026	
			a. Pembayaran Belanja Pegawai		201.170.827.146	
			b. Belanja Operasional Rutin		191.612.291.668	
c. Kegiatan yang dibiayai dari PHLN		80.000.000.000				

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN					
			<table><tr><td>d. Kegiatan/RO PN yang diampu Kementerian PPN/Bappenas</td><td>126.871.482.000</td></tr><tr><td>e. Kegiatan mendukung <i>Quick Wins</i> Presiden/Program Prioritas</td><td>988.638.905.963</td></tr><tr><td>f. Kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi utama yang merupakan mandatory</td><td>425.235.217.000</td></tr></table>	d. Kegiatan/RO PN yang diampu Kementerian PPN/Bappenas	126.871.482.000	e. Kegiatan mendukung <i>Quick Wins</i> Presiden/Program Prioritas	988.638.905.963	f. Kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi utama yang merupakan mandatory	425.235.217.000	
d. Kegiatan/RO PN yang diampu Kementerian PPN/Bappenas	126.871.482.000									
e. Kegiatan mendukung <i>Quick Wins</i> Presiden/Program Prioritas	988.638.905.963									
f. Kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi utama yang merupakan mandatory	425.235.217.000									
			untuk diusulkan dalam RAPBN Tahun 2026.							
			4. Kementerian PPN/Bappenas memperkuat peran sebagai penggerak sinergi perencanaan pembangunan pusat – daerah yang efektif dan terintegrasi dalam mencapai trisula pembangunan: penurunan kemiskinan, SDM berkualitas, dan pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.							
			5. Kementerian PPN/Bappenas memperkuat fungsi pengendalian pelaksanaan Visi - Misi Presiden Asta Cita dalam RPJMN 2025 – 2029 dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga.							
			6. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan program Kementerian/Lembaga yang menggunakan Pinjaman Luar Negeri kepada Komisi XI DPR RI untuk dibahas.							
			7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.							
9.	1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP); 2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 dengan agenda Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPKP	Komisi XI DPR RI bersama Kepala BPKP dan Kepala LKPP menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPKP dan Kepala LKPP mengenai Rencana Kerja dan Anggaran BPKP dan LKPP Tahun 2026. 2. Komisi XI DPR RI menerima penjelasan Pagu Indikatif BPKP dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan							

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																											
	Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).	dan LKPP Tahun Anggaran 2026.	<p>Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 sebesar Rp2.075.938.553.000,00 (Dua Triliun Tujuh Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut:</p> <p>(dalam rupiah)</p> <table><tr><th>NO</th><th>NAMA PROGRAM</th><th>ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026</th></tr><tr><td>1</td><td>Pengawasan Pembangunan</td><td>176.380.861.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Dukungan Manajemen</td><td>1.889.557.692.000</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>2.075.938.553.000</td></tr></table> <p>Berdasarkan fungsi Pagu Indikatif BPKP Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:</p> <p>(dalam rupiah)</p> <table><tr><th colspan="2">FUNGSI</th><th>ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026</th></tr><tr><td colspan="2">089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</td><td>2.075.938.553.000</td></tr><tr><td colspan="2">01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Program Pengawasan Pembangunan</td><td>176.380.861.000</td></tr><tr><td></td><td>Program Dukungan Manajemen</td><td>1.889.557.692.000</td></tr></table> <p>3. Komisi XI DPR RI mendukung dan menyetujui usulan BPKP mengajukan tambahan anggaran dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2026 sebesar Rp1.057.132.801.000,00 (Satu Triliun Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p>	NO	NAMA PROGRAM	ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026	1	Pengawasan Pembangunan	176.380.861.000	2	Dukungan Manajemen	1.889.557.692.000	Total		2.075.938.553.000	FUNGSI		ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026	089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan		2.075.938.553.000	01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM				Program Pengawasan Pembangunan	176.380.861.000		Program Dukungan Manajemen	1.889.557.692.000	
NO	NAMA PROGRAM	ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026																													
1	Pengawasan Pembangunan	176.380.861.000																													
2	Dukungan Manajemen	1.889.557.692.000																													
Total		2.075.938.553.000																													
FUNGSI		ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026																													
089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan		2.075.938.553.000																													
01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM																															
	Program Pengawasan Pembangunan	176.380.861.000																													
	Program Dukungan Manajemen	1.889.557.692.000																													

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN												
			<div>Uraian</div> <div>a. Program Pengawasan Pembangunan</div> <div>b. Program Dukungan Manajemen</div> <div>untuk diusulkan dalam RAPBN Tahun 2026.</div> <div>4. BPKP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</div> <div>a. Peningkatan kualitas pengawasan program-program pembangunan Pemerintah;</div> <div>b. Menjamin kualitas belanja Pemerintah untuk menciptakan nilai tambah, produktif mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi APBN, serta APBD.</div> <div>5. Komisi XI DPR RI menerima penjelasan Pagu Indikatif LKPP dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 sebesar Rp94.469.594.000,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut:</div> <div>(dalam rupiah)</div> <table><tr><th>NO</th><th>NAMA PROGRAM</th><th>ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026</th></tr><tr><td>1</td><td>Pengadaan Barang/Jasa Nasional</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Dukungan Manajemen</td><td>94.469.594.000</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>94.469.594.000</td></tr></table> <div>Berdasarkan fungsi Pagu Indikatif Kementerian LKPP, sebagai berikut:</div>	NO	NAMA PROGRAM	ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026	1	Pengadaan Barang/Jasa Nasional	0	2	Dukungan Manajemen	94.469.594.000	Total		94.469.594.000	<div>Alokasi Tambahan Anggaran 2026</div> <div>601.715.668.000</div> <div>455.417.133.000</div>	
NO	NAMA PROGRAM	ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026															
1	Pengadaan Barang/Jasa Nasional	0															
2	Dukungan Manajemen	94.469.594.000															
Total		94.469.594.000															

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																					
			<div>(dalam rupiah)</div> <table><tr><th colspan="2">FUNGSI</th><th>ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026</th></tr><tr><td colspan="2">106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</td><td>94.469.594.000</td></tr><tr><td colspan="2">01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pengadaan Barang/Jasa Nasional</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Program Dukungan Manajemen</td><td>94.469.594.000</td></tr></table> <div>6. Komisi XI DPR RI mendukung dan menyetujui usulan LKPP mengajukan tambahan anggaran dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2026 sebesar Rp248.638.705.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</div> <table><tr><th>Uraian</th><th>Alokasi Tambahan Anggaran 2026</th></tr><tr><td>a. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional</td><td>162.735.669.000</td></tr><tr><td>b. Program Dukungan Manajemen</td><td>85.903.036.000</td></tr></table> <div>untuk diusulkan dalam RAPBN Tahun 2026.</div> <div>7. LKPP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</div> <div><div>a. Peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung program Prioritas Nasional Asta Cita;</div><div>b. Peningkatan kualitas penerapan tata kelola pengadaan;</div><div>c. Peningkatan kualitas penerapan tata kelola internal;</div><div>d. Peningkatan penggunaan barang-barang produk dalam negeri, TKDN dan industri UMKM;</div></div>	FUNGSI		ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026	106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		94.469.594.000	01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM				Pengadaan Barang/Jasa Nasional	0		Program Dukungan Manajemen	94.469.594.000	Uraian	Alokasi Tambahan Anggaran 2026	a. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	162.735.669.000	b. Program Dukungan Manajemen	85.903.036.000	
FUNGSI		ALOKASI PAGU INDIKATIF 2026																							
106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		94.469.594.000																							
01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM																									
	Pengadaan Barang/Jasa Nasional	0																							
	Program Dukungan Manajemen	94.469.594.000																							
Uraian	Alokasi Tambahan Anggaran 2026																								
a. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	162.735.669.000																								
b. Program Dukungan Manajemen	85.903.036.000																								

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>e. Penggunaan sistem e-katalog yang ramah pengguna, kompetitif dan transparan.</p> <p>8. Kepala BPKP dan Kepala LKPP akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Jadwal Acara Rapat Komisi XI DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.	Tertutup.	
2.	Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 30 Juni 2025 dengan agenda Kebijakan <i>co-payment</i> Industri Asuransi.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua DK OJK) menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Ketua DK OJK mengenai substansi Kebijakan <i>co-payment</i> Industri Asuransi. 2. Komisi XI DPR RI mendukung langkah-langkah OJK dalam memperkuat ekosistem asuransi kesehatan dan menciptakan keseimbangan manfaat antara pemegang polis dan keberlanjutan bagi pelaku industri asuransi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) setelah dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI. 3. Dalam rangka penyusunan POJK sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 (dua), OJK menunda pelaksanaan Surat Edaran Otoritas Jasa 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan sampai diberlakukannya POJK.</p> <p>4. Komisi XI DPR RI melaksanakan <i>meaningfull participation</i> dalam rangka menyerap aspirasi dari pihak yang berkepentingan tentang pengaturan Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.</p> <p>5. Ketua DK OJK memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan/atau tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
3.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 dengan agenda Pengambilan keputusan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dan lain-lain.	Tertutup.	
4.	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025 dengan agenda Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengenai Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam menetapkan target, sasaran, arah kebijakan pembangunan nasional dalam RKP tahun 2026 menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan geopolitik dunia yang sangat dinamis karena memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional dan didasarkan pada realisasi pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di tahun 2025 yang masih di angka 4,87% pada Triwulan I 2025. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam menetapkan target, sasaran, arah kebijakan pembangunan nasional dalam RKP tahun 2026 memerhatikan <i>outlook</i> berdasarkan kinerja APBN 2025 bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan di angka 4,7 – 5,0%. 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.	
5.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 dengan agenda Laporan Panja Pertumbuhan, Laporan Panja Penerimaan, dan Laporan Panja Defisit.	Tertutup.	

D. TUGAS KHUSUS

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia Periode 2025 - 2030	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 dengan agenda Uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia Periode 2025 – 2030.	1. Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia Periode 2025 – 2030 yang mengikuti uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) sebagai berikut: 1) RICKY P. GOZALI; 2) DICKY KARTIKOYONO, SE. Akt., M.S.P.M. 2. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut: 1) <i>Curriculum Vitae</i> ; 2) Judul atau Tema materi; 3) Visi dan Misi; 4) Ringkasan singkat materi.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Penjelasan terkait uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2025 – 2030 sebagaimana terlampir.	
2.	Calon Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 - 2030	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 dengan agenda Uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Calon Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 – 2030.	<ol style="list-style-type: none"> Calon Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 – 2030 yang mengikuti uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> DODDY ZULVERDI; FARID AZHAR NASUTION, SE., MM., QRGF. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <i>Curriculum Vitae</i> Calon Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 – 2030; Judul atau Tema materi; Visi dan Misi; Ringkasan singkat materi. <p>Penjelasan terkait uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Calon Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 – 2030 sebagaimana terlampir.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri ESDM RI	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.	1. Pembahasan Asumsi Dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2026. 2. Penetapan Asumsi Dasar Sektor ESDM untuk pada RAPBN 2026.	
2.	Menteri ESDM RI	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.	Pengantar Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L TA. 2026.	
3.	Eselon I Kementerian ESDM	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 10.30 WIB.	1. Progres pelaksanaan kegiatan TA. 2025. 2. Pembahasan RKA-K/L dan RKP TA. 2026.	
4.	Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM RI	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah.	Pengantar Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L TA. 2026.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Raker dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 19.00 WIB.		
5.	Eselon I Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM RI	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.	1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan TA. 2025. 2. Pembahasan RKA K/L dan RKP TA. 2026.	
6.	Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM RI	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 22.00 WIB.	1. Penetapan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026. 2. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	
7.	Menteri Lingkungan Hidup / BPLH RI	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.	Pengantar Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L TA. 2026.	
8.	Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup / BPLH RI	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 13.30 WIB.	1. Progres pelaksanaan kegiatan TA. 2025. 2. Pembahasan RKA-K/L dan RKP TA. 2026.	
9.	Menteri Lingkungan Hidup / BPLH RI	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Raker dilaksanakan pada tanggal 8	1. Penetapan RKA-K/L dan RKP TA. 2026. 2. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Juli 2025 pukul 16.00 WIB.		
10.	Kepala BIG dan Kepala BAPETEN	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 19.00 WIB.	1. Progres pelaksanaan kegiatan TA. 2025. 2. Pembahasan RKA-K/L dan RKP TA. 2026. 3. Penetapan RKA-K/L dan RKP TA. 2026. 4. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Pimpinan	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.	1. Menyusun Jadwal Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025. 2. Lain-lain.	
2.	Rapat Internal	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah.	1. Menetapkan Jadwal Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025. 2. Menetapkan Daerah Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025. 3. Kelanjutan pembahasan RUU EBET dan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 13.00 WIB.	pembentukan Panja RUU EBET, dan kelanjutan pembahasan RUU Ketenagalistrikan. 4. Pembentukan Panja Peningkatan Pendapatan Negara (PPN). 5. Lain-lain.	
3.	Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Audiensi dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.	Rencana Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur	
4.	Dirjen Ketenagalistrikan KESDM RI dan Dirut PT PLN (Persero)	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 13.00 WIB.	1. Progres bauran energi pembangkit tenaga listrik. 2. Realisasi dan proyeksi subsidi listrik Tahun 2025 dan Tahun 2026. 3. Progres program listrik desa. 4. Lain-lain.	
5.	Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala SKK Migas,	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan	1. Performa penerimaan negara sektor Hulu Migas pada Tahun 2025 dan target Tahun 2026.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Kepala BPH Migas dan Dirut PT Pertamina (Persero)	negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.	2. Progres <i>Lifting</i> Migas Tahun 2025 dan target Tahun 2026. 3. Realisasi kuota dan subsidi BBM dan LPG Tahun 2025 dan proyeksi Tahun 2026. 4. Pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi. 5. Proyeksi ICP Tahun 2026. 6. Lain-lain.	
6.	Kepala SKK dengan menghadirkan 10 KKKS terbesar	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.	1. Realisasi <i>Lifting</i> Migas Tahun 2025. 2. Proyeksi <i>Lifting</i> Migas Tahun 2026. 3. Realisasi <i>Cost Recovery</i> 2025. 4. Proyeksi <i>Cost Recovery</i> 2026. 5. Analisis <i>Cost</i> per Barrel setiap blok migas. 6. Lain-lain.	
7.	Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. Rapat Audiensi dengan dilaksanaka pada tanggal 1 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.	1. Izin Ekspor PT AMNT 2. Dana Bagi Hasil Tambang 3. Kawasan Industri <i>Smelter</i> PT AMNT 4. CSR Project PT AMNT Kabupaten Sumbawa Barat	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	Ketua LPEM UI, Kepala INDEF, Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc. Ph.D., Prof. Ir Asri Nugrahanti Permadi, M.Sc. Ph.D., Topan Herianto Ph.D., Prof. Dr.-Ing. Ir Rudi Rubiandini R.S., Dipl., Ing	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDPU dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.	1. Asumsi ICP dan <i>Lifting</i> Migas dalam RAPBN Tahun 2026. 2. Investasi Hulu Migas. 3. Lain-lain.	
9.	Dirjen Minerba dan Dirut PT Manusela Prima mining	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP Panja Minerba dilaksanaka pada tanggal 2 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.	1. Tindak lanjut Laporan Masyarakat yang berkaitan dengan masalah perizinan sengketa lahan Masyarakat dan dampak lingkungan 2. lain-lain	
10.	Dirjen Minerba dan Deputi Bidang Gakkum KLH, RDPU dengan Dirut PT. Sumatera Tobacco Trading Company (PT STTC, Dirut PT Jui Shin dan Dirut PT Waruna Shipyard Indonesia	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 pukul 15.00 WIB.	1. Tindak lanjut hasil kunjungan kerja Komisi XII DPRI RI. 2. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
11.	Deputi Bidang Gakkum KLH dan RDPU dengan PT Indonesia Wea Bay Industril Park (PT IWIP) dan PT Weda Bay Nickel	<div>1. Pelaksanaan undang-undang;</div> <div>2. Pelaksanaan keuangan negara;</div> <div>3. Kebijakan Pemerintah.</div> <div>RDP dengan Dirjen Minerba dilaksanaka pada tanggal 3 Juli 2025 pukul 11.00 WIB.</div>	<div>1. Tindak lanjut kunjungan kerja ke PT IWIP.</div> <div>2. Lain-lain.</div>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Perubahan Kedua UU Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban	Kunspek legislasi dilaksanakan tgl Selasa – Kamis 1-3 Juli 2025 Ke: 1. Provinsi BaBel 2. Provinsi Riau 3. Provinsi Kep. Riau	Mendapatkan Masukan atas Rencana Penyusunan RUU Perubahan Kedua UU Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban Dari para <i>stakholder</i> di daerah.	Dari para <i>stakholder</i> di daerah.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
11.	Kementerian HAM	Pembahasan RKA dan RKP K/L Kementerian HAM Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Senin 7 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.	Tertutup	
12.	Kementerian Hukum	Pembahasan RKA dan RKP K/L Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Senin 7 Juli 2025 pukul 14.00 WIB	Tertutup	
13.	LPSK	Pembahasan RKA dan RKP K/L LPSK Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Selasa 8 Juli 2025 pukul 12.00 WIB.	Tertutup	
14.	Komnas HAM dan Komnas Perempuan	Pembahasan RKA dan RKP K/L Komnas HAM dan Komnas Perempuan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Selasa 8 Juli 2025 pukul 15.00 WIB.	Tertutup	
15.	Menteri Sekretaris Negara	Pembahasan RKA dan RKP K/L Kemen Setneg Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Rabu 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.	Tertutup	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
16.	BPIP	Pembahasan RKA dan RKP K/L BPIP Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Rabu 9 Juli 2025 pukul13.00 WIB.	Tertutup	
17.	Kepala BNPT	Pembahasan RKA dan RKP K/L BNPT Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Rabu 9 Juli 2025 pukul15.00 WIB.	Tertutup	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
12.	Rapat intern	Rapat Dilaksanakan pada tanggal Selasa, 24 Juni 2025 dengan agenda: 1. Membahas Program Kegiatan/Jadwal Kegiatan Komisi XIII DPR RI MS IV TS 2024-2025. 2. Menetapkan Daerah Kunker Reses MP IV TS 2024-2025.	Daerah Kunker Reses: 1. Kalimantan Timur, Balikpapan, dan IKN 2. Sulawesi Tenggara, Kendari 3. Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT Pelaksanaan : 25-29 Juli 2025.	Tertutup.

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	-	Rapat Baleg dilaksanakan pada Kamis, 24 Juni 2025 pukul 14.09 WIB	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Penetapan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024—2025.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024—2025 akan diisi dengan kegiatan untuk penyusunan RUU yang telah disiapkan Badan Legislasi. Adapun RUU yang akan disusun oleh Baleg yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan: <ul style="list-style-type: none"> RUU tentang PPRT RUU tentang Komoditas Strategis RUU tentang Pertekstilan RUU tentang BPIP Harmonisasi: <ul style="list-style-type: none"> RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024—2025 yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan catatan jadwal acara rapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang	Rapat Panja dilaksanakan pada Selasa, 24 Juni 2025 pukul 16.41 WIB	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.</p> <p>Kesimpulan:</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pembahasan lebih mendalam terkait Haji Kuota dan Non Kuota 2. Pembicaraan lebih mendalam akan dibahas dalam konsinyering yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 	
3.	RUU tentang Komoditas Strategis	RDP/RDPU dilaksanakan pada Rabu, 25 Juni 2025 pukul 10.44 WIB	<p>Badan Legislasi melaksanakan RDP/RDPU dalam rangka penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis dengan Gubernur Provinsi Lampung dan Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI).</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Lampung menekankan pentingnya pembatasan impor untuk menjaga harga tapioka dalam negeri agar tidak jatuh. Namun, selama 4 bulan belum ada keputusan terkait pembatasan impor. Lampung memiliki stok tapioka sebesar 250 ribu ton. Musim panen di Lampung menghasilkan lebih banyak dibandingkan Vietnam dan Thailand. Harga Eceran Tertinggi (HET) tapioka adalah Rp 5.500, sementara biaya produksi adalah Rp 5.800 dan harga impor adalah Rp 5.200. Kebutuhan nasional defisit 1 juta ton, sedangkan produksi Lampung menurut BPS adalah 1.400.000 ton. Menurut data pengusaha, mereka memproduksi 5 juta ton, dengan laporan pajak menunjukkan produksi antara 3,9 hingga 5,2 juta ton. 2. Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) mengusulkan agar produksi olahan singkong dialihkan dari komoditas industri menjadi komoditas pangan. 3. Aliansi Masyarakat Peduli Singkong tidak ada pabrik singkong yang tutup di Lampung meskipun kondisi saat ini sulit. Ada pengusaha Indonesia yang menanam dan memproduksi singkong di Thailand dan Vietnam, kemudian mengimpornya ke Indonesia karena akses yang dibuka oleh Kementerian Perdagangan. 4. Perlunya perlindungan singkong sebagai bagian dari komoditas pangan dan energi baru terbarukan. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Terdapat usulan untuk membuat struktur biaya perbandingan dengan Vietnam dan Thailand.	
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	Konsinyering dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni 2025.	Konsinyering Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dengan Pimpinan Komisi VIII sebagai Pengusul RUU dan Kepala BPH	
5.	UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	RDPU dilaksanakan pada Senin, 30 Juni 2025 pukul 11.13 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan RDPU dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan SP SKKMIGAS. Kesimpulan: 1. Usulan tata kelola berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pengelolaan langsung oleh negara atau badan usaha milik negara. Pentingnya penguatan kelembagaan hulu migas untuk menyelesaikan permasalahan saat ini. 2. Mendesak untuk segera diundangkan RUU Migas untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan meningkatkan efisiensi tata kelola hulu migas. Tanpa revisi UU, swasembada energi tidak akan tercapai dan akan terjadi krisis produksi migas.	
6.	RUU tentang PPRT	FGD dilaksanakan pada tanggal 1-3 Juli 2025.	<i>Focus Group Discussion</i> di Universitas Udayana, Bali.	
7.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2025-2029	Rapat Baleg dilaksanakan pada Jumat, 4 Juli 2025 pukul 10.32 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Baleg dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2025-2029. Kesimpulan:	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dua misi utama dalam Renstra DPR RI 2025-2029, misi pertama berfokus pada penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan peran diplomasi parlemen sebagai representasi rakyat yang aspiratif, responsif, dan akuntabel. Misi kedua berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola kelembagaan DPR RI yang dinamis (<i>dynamic parliament governance</i>) untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi 2. Renstra DPR RI mendukung Prioritas Nasional dalam RPJMN, seperti Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM (Prioritas Nasional 1) serta Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi (Prioritas Nasional 7). Ini mencakup penguatan lembaga demokrasi, peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan, serta penguatan komunikasi publik. 3. Pembahasan materi-materi Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2025-2029 akan dibahas dalam Panja 4. Panja akan diagendakan pada hari Jumat, 4 Juli 2025 setelah Rapat Badan Legislasi 	
8.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2025-2029	Rapat Panja dilaksanakan pada Jumat, 4 Juli 2025 pukul 14.45 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2025-2029.</p> <p>Rapat bersifat tertutup.</p>	Rapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.
9.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis	Rapat Panja dilaksanakan pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 10.40 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2025-2029.</p> <p>Rapat bersifat tertutup.</p>	Rapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	(RENSTRA) DPR RI 2025-2029			
10.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2025-2029	Rapat Baleg dilaksanakan pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 13.58 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Baleg dalam rangka Pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2025-2029. Kesimpulan: 1. Menerima Laporan Ketua Panja atas hasil pembahasan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2025-2029. 2. Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-PAN, dan F-P Demokrat) menyetujui hasil pembahasan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2025-2029 untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Rapat Panja dilaksanakan pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 15.21 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Rapat bersifat tertutup.	Rapat dihadiri oleh Pimpinan Komisi VIII sebagai Pengusul RUU.
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Rapat Panja dilaksanakan pada Senin, 8 Juli 2025 pukul 14.16 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Rapat bersifat tertutup	Rapat dihadiri oleh Pimpinan Komisi VIII sebagai Pengusul RUU.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
13.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Rapat Baleg dilaksanakan pada Senin, 8 Juli 2025 pukul 16.15 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Baleg dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Laporan Ketua Panja atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 2. Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-PAN, dan F-P Demokrat) menyetujui hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk disampaikan kepada Pengusul RUU dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
14.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	RDPU dilaksanakan pada Selasa, 9 Juli 2025.	<p>Badan Legislasi melaksanakan RDPU dalam rangka penyusunan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H dan Lukman Hakim Saifuddin.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Seluruh masukan yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan bagi Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.</p>	
15.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Konsinyering dilaksanakan pada tanggal 9-11 Juli 2025.	Konsinyering dalam rangka penyusunan RUU tentang BPIP dengan Kepala BPIP.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Yunani dilaksanakan pada 21-27 Juni 2025.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP) mengadakan Kunjungan Diplomasi BKSAP ke Yunani. Delegasi beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Muhammad Husein Fadlulloh (F-PGerindra), Wakil Ketua BKSAP DPR RI2. Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Anggota BKSAP DPR RI <p>Delegasi mengadakan pertemuan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Greece – <i>Indonesia Parliamentary Friendship Group</i> <p>Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri dari Fraksi PDI-P melakukan rangkaian pertemuan dengan Grup Kerja Sama Bilateral Parlemen Yunani – DPR RI dan Kementerian Luar Negeri Yunani dalam rangka Kunjungan Diplomasi ke Yunani.</p> <p>Mengawali jalannya pertemuan, Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan terima kasih atas penerimaan hangat Parlemen Yunani, sekaligus mengapresiasi 76 tahun hubungan bilateral diantara kedua negara, yang telah dimulai sejak tahun 1949. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Ketua BKSAP Hussein Fadlulloh dari Fraksi Gerindra dan Anggota BKSAP Gilang Dhielafararez dari Fraksi PDI-P. Sedangkan dari Parlemen Yunani diwakili oleh Ketua Grup Kerja Sama Bilateral Parlemen Yunani – DPR RI Makarios Lazaridis bersama Wakilnya, Anastasios Dimoschakis.</p> <p>Dalam sambutannya Irine menyampaikan bahwa kedua negara merupakan sama-sama demokrasi dan negara kepulauan dengan monumen sejarah</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>serta budaya yang signifikan. Keduanya juga menjalin kerja sama di berbagai bidang, termasuk politik, maritim, budaya, dan pariwisata. Indonesia dan Yunani juga berkolaborasi di forum-forum internasional, misalnya dalam dukungan bersama untuk pencalonan anggota Dewan Keamanan PBB (Yunani untuk 2025-2026 – Indonesia untuk 2019-2020).</p> <p>Politisi PDI-P tersebut juga menyampaikan bahwa hubungan bilateral antara kedua parlemen, ditandai oleh landasan persahabatan dan kerja sama yang kuat, dengan upaya untuk lebih memperkuat diplomasi parlemen.</p> <p>“Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral antar kedua parlemen merupakan bukti kuat adanya upaya peningkatan kerja sama bilateral yang didorong oleh parlemen kedua negara”. Demikian disampaikan oleh politisi PDI-P tersebut.</p> <p>2. Kementerian Luar Negeri Yunani</p> <p>Sementara itu pada kesempatan terpisah, Delegasi juga melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Luar Negeri Yunani, Dimitrios Karabalis beserta jajaran.</p> <p>Pertemuan membahas mengenai perlunya peningkatan kerja sama ekonomi dan maritim diantara kedua negara, terlebih keduanya sama-sama merupakan negara kepulauan dan masih terdapat banyak peluang kerja sama ekonomi antara kedua negara yang dapat di eksplorasi lebih luas.</p> <p>Pada pertemuan ini Wakil Ketua BKSAP Hussein Fadlulloh dari Fraksi Gerindra menyampaikan pandangannya bahwa persahabatan dan kerja sama yang erat antara Indonesia dan Yunani sedang meningkat pesat. Hal ini karena adanya upaya melalui pertemuan dan konsultasi rutin antara pejabat tinggi kedua negara.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Politisi muda Gerindra tersebut juga menyambut baik saling kunjung antara Wakil Menteri Luar Negeri Yunani dan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, yang menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat hubungan bilateral. Lebih jauh, Hussein Fadlulloh juga mendorong agar kedua negara dapat lebih banyak mengeksplorasi peluang peningkatan kerja sama ekonomi dan maritim, terutama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.</p> <p>"Kami berpandangan bahwa di sektor ekonomi dan maritim, masih banyak ruang untuk peningkatan, karena arus perdagangan dan investasi masih rendah dan belum melampaui potensi yang ada di kedua negara". Demikian disampaikan oleh Politisi muda tersebut.</p>	
2.	FKLNA - ABA	Peran Diplomasi <i>Soft Power</i> (P To P) melalui Pertukaran Mahasiswa antar Bangsa, UII, Yogyakarta dilaksanakan pada 26 Juni 2025.	<p>Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Universitas Islam Indonesia (UII) dengan tema "Peran Diplomasi <i>Soft Power</i> (P-to-P) melalui Pertukaran Mahasiswa antar Bangsa."</p> <p>Diskusi terkait tema ini menghadirkan pembicara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bramantyo Suwondo, M.IR. (Wakil Ketua BKSAP DPR RI) • Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. (Rektor UII) • H. Fathi (Anggota BKSAP DPR RI) • Amelia Anggraini (Anggota BKSAP DPR RI) <p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo, serukan pentingnya <i>soft power diplomacy - people to people-</i> dalam kehidupan kampus.</p> <p>BKSAP DPR RI tentu memiliki tugas yang jelas dalam regulasi untuk memperkuat diplomasi parlemen. Namun, diplomasi <i>people to people</i> antarbangsa juga perlu kita bangun dan tingkatkan. Untuk itu, hubungan masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan agar menjadi</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>jembatan yang menghubungkan kedua negara, baik secara bilateral maupun internasional.</p> <p>Kami telah beberapa kali bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk memberikan masukan bagi kami, agar ada peningkatan dalam diplomasi parlemen. Hari ini, kami hadir di kampus swasta tertua dan terbesar di Yogyakarta UII untuk menerima berbagai masukan yang telah disampaikan. Momentum ini sangat baik karena dalam membangun kerja sama internasional, diperlukan kolaborasi yang solid dan integrasi dari berbagai elemen.</p> <p>Terkait temuan-temuan yang disampaikan oleh para akademisi UII Yogyakarta dalam pertemuan tadi, apakah nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan komisi terkait? Tentu saja kami akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut. Salah satu contohnya adalah perlunya memperkuat program beasiswa bagi mahasiswa di kawasan ASEAN guna mendukung penguatan diplomasi <i>soft power</i> di kawasan ASEAN. Selain itu, kami juga berupaya agar Paspor hijau kita semakin diakui di tingkat internasional. Dengan demikian, kami dapat menyampaikan berbagai isu strategis ini dalam forum-forum terkait di dalam negeri untuk dibahas bersama pemerintah.</p>	
3.	KSI - BKSAP	FGD Panja Organisasi Internasional 'Mengoptimalkan Peran Parlemen dalam Akses Indonesia ke OEC" dilaksanakan pada 26 Juni 2025.	<p>Panitia Kerja Organisasi Internasional (Panja OI) BKSAP DPR RI mengadakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan tema "Mengoptimalkan Peran Parlemen dalam Akses Indonesia ke OECD" di Tangerang Selatan, Kamis (26/6/2025).</p> <p>FGD ini menghadirkan pembicara yakni dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta perwakilan OECD di Indonesia.</p> <p>Ketua Panja OI yang juga merupakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan dukungan parlemen terhadap upaya pemerintah mempercepat proses akses Indonesia menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>“Indonesia tentu ingin mempercepat akses ke OECD dan parlemen memiliki peran penting untuk merealisasikan hal tersebut,” ujar Ravindra Parlemen harus melakukan penyesuaian di level regulasi, baik itu regulasi undang-undang maupun regulasi peraturan pemerintah misalnya. Salah satunya adalah undang-undang tentang statistik, kemudian ratifikasi tentang <i>foreign bribery</i> dan juga terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Peran Parlemen di sini adalah amandemen regulasi atau dukungan regulasi.</p> <p>Ravindra menggarisbawahi manfaat konkret dari keanggotaan Indonesia di OECD, yaitu adanya potensi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,94%, di samping perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan akses pasar yang lebih luas.</p> <p>“Apabila berhasil mendapatkan akses maka ini akan meningkatkan PDB kita di angka 0,94%. Kedua, mendorong <i>human development index</i> kita lebih baik lagi dan juga akses pasar ke 38 member OECD. Jadi akses pasar impor Indonesia meningkat lebih luas lagi,” jelas Ravindra.</p>	
4.	KSI - BKSAP	296th IPU Executive Committee, Olympia, Yunani dilaksanakan pada 29 Juni 2025.	<p><i>296th IPU Executive Committee</i>: Mardani dorong IPU fokus tangani akar masalah konflik Yunani— Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, mendorong Uni Parlemen Dunia (<i>Inter-Parliamentary Union/IPU</i>) untuk fokus menangani akar masalah konflik seiring dengan semakin meningkatnya titik konflik dan ketegangan di berbagai belahan Dunia.</p> <p>Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pertemuan ke-296 <i>IPU Executive Committee</i> di Olympia, Yunani, Minggu (29/6), menyikapi situasi krisis dan titik konflik yang membara di beberapa tempat saat ini termasuk di Timur Tengah.</p> <p>Pertemuan kali ini merupakan rapat pimpinan IPU yang membahas beberapa agenda penting organisasi global tersebut yang dihadiri oleh perwakilan parlemen dari Aljazair, Australia, Azerbaijan, Indonesia, Nigeria, Polandia, Prancis, Qatar, RD Kongo, Spanyol, Yordania, Yunani, dan Zambia.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Mardani mengatakan isu-isu konflik seperti Gaza dan Palestina, titik konflik di Timur Tengah maupun situasi rentan di kawasan Afrika, perlu dilihat dalam skema yang lebih luas dengan menangani permasalahan di hilir tidak hanya di hulu.</p> <p>Beberapa indikator seperti Indeks Demokrasi yang diluncurkan oleh <i>The Economist Intelligence Unit</i> yang menunjukkan penurunan kualitas demokrasi global hingga hanya 17% dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>) yang sesuai jalur untuk tercapai pada 2030 dan adanya peningkatan konflik menunjukkan relasi signifikan dari situasi pembangunan dengan sikap bermusuhan.</p> <p>“Mari kita fokus pada akar masalah bukan hanya pada dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, perlu kiranya juga kita memiliki semangat pada upaya pembangunan seperti meningkatkan pencapaian global tujuan pembangunan berkelanjutan hingga pembenahan institusi-institusi demokrasi,” lanjutnya.</p>	
5.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Ketua GKSB Ekuador dengan Dubes Ekuador untuk Indonesia dilaksanakan pada 30 Juni 2025.	<p>Pertemuan bilateral antara Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Ekuador, Aqib Ardiansyah (F-PAN) dan Dubes Ekuador Luis Arellano menandai komitmen kuat kedua negara untuk terus mempererat kerja sama, khususnya di bidang perdagangan, energi, pendidikan, dan diplomasi parlemen. Tahun ini, Indonesia dan Ekuador merayakan 45 tahun hubungan diplomatik.</p> <p>Dubes Ekuador menyoroti potensi besar sektor ekspor seperti cokelat, pisang, dan bunga, serta kerja sama perdagangan senilai USD 200 juta yang telah berjalan dengan Indonesia. Ia juga menyampaikan pentingnya promosi pariwisata dan <i>people-to-people contact</i>, termasuk mendorong kesetaraan kebijakan bebas visa antar kedua negara.</p> <p>Ketua GKSB menyampaikan rencana kunjungan ke Parlemen Ekuador tahun ini, yang disambut baik oleh Dubes. Keduanya sepakat bahwa diplomasi parlemen,</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			keterlibatan generasi muda, serta transisi energi terbarukan menjadi fondasi penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Ekuador ke depan.	
6.	KSI - BKSAP	Kunjungan Panja Organisasi Internasional BKSAP DPR RI ke Batam dalam rangka peninjauan kesiapan akses Indonesia ke OECD dilaksanakan pada 1 Juli 2025.	<p>Panja Organisasi Internasional BKSAP DPR RI meninjau langsung iklim investasi di Batam sebagai bagian dari dukungan DPR RI terhadap proses akses Indonesia ke OECD.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP DP RI, Ravindra Airlangga menyebut akses ke OECD akan mendorong iklim investasi dan memperkuat tata kelola daerah. Dalam kunjungan ini, BP Batam menjadi benchmark sistem pelayanan terpadu (<i>one stop service</i>) untuk perizinan usaha.</p> <p>Ravindra juga menjelaskan salah satu keuntungan Indonesia jika menjadi anggota OECD adalah peningkatan kepercayaan investor global yang akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.</p>	
7.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSB Armenia dengan Duta Besar Armenia untuk Indonesia dilaksanakan pada 1 Juli 2025.	GKSB Armenia mengadakan <i>Courtesy Call</i> dengan Duta Besar Armenia untuk Indonesia.	
8.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB Hungaria dilaksanakan pada 1 Juli 2025.	<p>GKSB DPR RI - Parlemen Nigeria yang dipimpin oleh Andre Rosiade (F-PD) menggelar rapat internal guna membahas rencana program kerja GKSB DPR RI - Parlemen Hungaria dalam periode 2024-2029.</p> <p>Ketua GKSB menilai perlu ditingkatkannya hubungan antar-parlemen kedua negara serta berbagai kerja sama bidang strategis lainnya seperti perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Guna mempererat relasi antar-parlemen kedua negara, GKSB Hungaria rencananya akan mengunjungi Budapest pada akhir September mendatang.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Hungaria diantaranya Puteri Komarudin (F-PG), Kawendra Lukistan (F-PGERINDRA), Dr. H. Anggia Ermarini (F-PKB) serta Verrel Bramasta (F-PAN).	
9.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP ke Jepang dilaksanakan pada 1 – 7 Juli 2025.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) mengadakan Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Jepang. Delegasi Beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Wakil Ketua BKSAP DPR RI2. Muhammad Husein Fadlulloh (F-PGerindra), Wakil Ketua BKSAP DPR RI3. Bramantyo Suwondo (F-PD), Wakil Ketua BKSAP DPR RI4. Galih Dimuntur Kartasasmita (F-PG), Anggota BKSAP DPR RI <p>Delegasi mengadakan pertemuan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Divisi Internasional Partai LDP Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) selaku Ketua Delegasi Kunjungan Diplomasi BKSAP ke Jepang memimpin pertemuan dengan Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal Divisi Internasional LDP, Hon. Ms. Tsuchiya Shinako dan Hon. Mr. Ito Tatsuya. <p>Dalam pertemuan tersebut BKSAP menekankan pentingnya hubungan antar-parlemen dalam mendukung penguatan kerja sama antar-kedua negara. LDP sendiri merupakan partai mayoritas di parlemen dan serta juga merupakan Partai Penguasa di Jepang selama lebih dari 30 tahun. Peningkatan intensitas komunikasi antara DPR RI dan pihak LDP serta Parlemen Jepang hendaknya dapat menjembatani kepentingan kedua negara.</p> <p>Terkait pendidikan dan ketenagakerjaan, BKSAP juga mengapresiasi pemerintah Jepang yang telah memberikan banyak kesempatan beasiswa bagi pelajar Indonesia dan penyerapan tenaga kerja terampil Indonesia di Jepang.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Direktur Jenderal Divisi Internasional LDP, Hon. Ms. Tsuchiya Shinako mengapresiasi kehadiran Delegasi BKSAP di Jepang dan berdiskusi terkait situasi global terkini dan berbagai potensi penguatan kerja sama antara RI - Jepang khususnya pada bidang politik, populasi dan penanggulangan bencana. Beliau menilai situasi dunia yang kian tidak menentu baiknya dapat jadi momentum penguatan Kerja sama bilateral antara RI - Jepang, guna menjawab berbagai tantangan global. Pihaknya lalu menyampaikan dengan banyaknya wisatawan dan pekerja Indonesia dapat menjadi hubungan mutualisme bagi kedua negara yang dapat meningkatkan perekonomian dan menjawab tantangan populasi RI maupun Jepang. Dibahas pula rencana Pemerintah Jepang yang akan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Alam, dimana Indonesia juga dapat ambil andil dalam bertukar praktik terbaik dan pengalaman penanggulangan bencana di negara kepulauan.</p> <p>Menutup pertemuan, BKSAP juga menyatakan agar Pemilu Jepang yang akan diadakan pada tanggal 20 Juli 2025 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang terbaik tidak hanya bagi Masyarakat Jepang, namun juga bagi WNI yang berada di Jepang.</p> <p>2. KBRI Tokyo</p> <p>Melanjutkan agenda Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Jepang, Delegasi yang dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) juga berkesempatan untuk mengadakan pertemuan dengan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Tokyo, Ibu Maria Renata Hutagalung beserta jajaran KBRI Tokyo.</p> <p>Delegasi BKSAP menyampaikan terima kasih atas penerimaan yang hangat oleh KBRI Tokyo serta mengapresiasi upaya yang telah ditempuh dalam mempererat hubungan dan meningkatkan Kerja sama antara RI dan Jepang. Kedua pihak berdiskusi lebih lanjut membahas Langkah - Langkah penguatan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kerja sama ketenagakerjaan antara RI - Jepang. Tingginya minat tenaga kerja RI untuk bekerja di Jepang menjadi tantangan tersendiri bagi DPR RI maupun KBRI Tokyo, namun kedepannya kedua pihak akan terus bekerja sama dalam mengatasi hal tersebut.</p> <p>Selain ketenagakerjaan dibahas pula berbagai potensi kerja sama antara RI - Jepang pada berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, Pendidikan dan energi.</p> <p>3. Wamenlu Jepang Delegasi Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI berkesempatan mengadakan <i>Courtesy Call</i> dengan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, H.E. Mr. Miyaji Takuma guna membahas kerja sama polugri antara RI - Jepang serta potensi kerja sama di bidang energi, ekonomi dan ketenagakerjaan.</p> <p>Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, H.E. Mr. Miyaji Takuma mengapresiasi kehadiran Delegasi BKSAP di Jepang yang menunjukkan komitmen DPR RI dalam menjembatani hubungan antara RI - Jepang. Kedua pihak saling mengapresiasi sikap saling dukung yang diberikan pada berbagai isu di forum internasional. BKSAP memandang Jepang sebagai saudara yang dapat saling membantu dalam menjawab berbagai tantangan bersama. Kedua pihak lalu membahas penguatan Kerja sama antara RI - Jepang pada bidang energi, energi terbarukan, ekonomi hijau, ekonomi biru dan ketenagakerjaan.</p>	
10.	BKSAP	Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI ke-7 dilaksanakan pada 7 Juli 2025.	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI mengadakan Rapat Pimpinan ke-7 BKSAP DPR RI pada hari Senin (07/07/2025).</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP guna membahas berbagai rencana kegiatan BKSAP serta bagian - bagian terkait dan rencana partisipasi BKSAP pada berbagai organisasi parlemen internasional maupun regional.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Turut hadir secara fisik dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP) dan Ravindra Airlangga (F-PG).	
11.	KSB - BKSAP	Rapat Koordinasi Peran Strategis <i>Parliamentary Friendship Group</i> (GKSB) DPR RI terhadap Pelaksanaan Diplomasi Parlemen dilaksanakan pada 8 Juli 2025.	<p>DPR RI terus mengintensifkan langkah diplomasi parlemen melalui penguatan peran Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) di periode 2024–2029. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan pentingnya aktivasi 68 GKSB sebagai garda depan diplomasi antar parlemen. Langkah ini dinilai strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.</p> <p>Dengan mitra parlemen dari 102 negara, GKSB menjadi alat penting untuk menyuarakan kepentingan nasional dan membangun kerja sama konkret yang menguntungkan rakyat. Sebanyak 68 negara telah ditetapkan sebagai prioritas kunjungan, berdasarkan stabilitas politik dan keamanan, membuka ruang dialog yang konstruktif antara parlemen Indonesia dan negara sahabat.</p> <p>Pimpinan BKSAP senantiasa mengajak seluruh Ketua GKSB untuk segera menjalin komunikasi aktif dengan mitra luar negeri. Aktivasi GKSB bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari strategi besar diplomasi parlemen Indonesia. Melalui jalur ini, DPR RI dapat berkontribusi langsung membentuk wajah diplomasi Indonesia yang lebih setara, terbuka, dan berdaya saing.</p>	
12.	KSB - BKSAP	Pertemuan Ketua BKSAP dengan Tim <i>Project Design</i> dari Kedutaan Besar Australia dilaksanakan pada 9 Juli 2025.	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera menerima Tim <i>Project Design</i> dari Kedutaan Besar Australia (09/07/2025).</p> <p>Pertemuan tersebut bertujuan untuk meninjau program kerja sama antara DPR RI dan Parlemen Australia dalam bidang penguatan demokrasi dan kerja sama politik. Ketua BKSAP menilai DPR RI dan Pihak Australia dapat memulai program kerja sama yang berfokus dalam meningkatkan partisipasi publik serta memfasilitas interaksi Anggota Parlemen dengan Konstituennya ataupun NGO. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penyerapan aspirasi dan menjalin hubungan yang lebih baik antara anggota parlemen dan ekosistem demokrasi.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Kedepannya BKSAP dan pihak Australia akan terus meningkatkan komunikasi, serta diharapkan pada bulan Desember, kerangka awal program kerja sama tersebut dapat segera dibahas kembali.	
13.	KSR - BKSAP	Kunjungan Panja <i>Open Government-Parliament</i> (OG-P) ke NTB dilaksanakan pada 9 Juli 2025.	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh (F-PGerindra), selaku Ketua Panja <i>Open Government-Parliament</i> (OG-P) memimpin kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai OGP <i>Local</i> yang aktif dan terbuka, Rabu (9/7).</p> <p>Husein tegaskan komitmen DPR RI melalui <i>Open Parliament Indonesia</i> (OPI) sejak 2018 sebagai institusi yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Saat ini, DPR RI bekerja sama dengan BAPPENAS tengah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN OPI) yang akan menjadi bagian dari RAN <i>Open Government Indonesia</i> (OGI) 2026–2028.</p> <p>Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menyampaikan komitmen NTB melanjutkan OGP pada 5 tahun ke depan untuk tekan kemiskinan, perkuat ketahanan pangan, dan dorong pariwisata.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Delegasi Panja OG-P, Himmatul Aliyah (F-PGerindra), Robert Joppy Kardinal (F-PG), dan Aboe Bakar Al-Habsyi (F-PKS).</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Pimpinan dan Rapat Intern	Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025.	1. Membahas dan mengesahkan program kerja Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024 – 2025; 2. Membahas pengaduan yang masuk; dan 3. Lain-lain.	
2.	-	<i>Paket Meeting</i> Wisma Griya Sabha Kopo dilaksanakan pada hari Rabu s.d. Jumat, 25 s.d 27 Juni 2025.	Dengan tema “Etika Komunikasi Politik di Ruang Publik”.	
3.	DPRD Kabupaten Tasikmalaya	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Senin, 26 Juni 2025.	Dalam rangka konsultasi terkait Tugas, Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.	
4.	DPRD Kabupaten Manggarai Timur	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Juli 2025.	Dalam rangka konsultasi terkait disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan kode etik serta terkait penyelesaian persoalan Pimpinan/Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik serta tata beracara dalam hal mekanisme dan tahapan penyelesaian masalah.	
5.	-	Kunjungan Kerja Luar Negeri, Parlemen Italian / Roma dilaksanakan pada hari Senin – Minggu, 30 Juni s.d 6 Juli 2025.	Kunjungan Diplomasi Parlemen dalam rangka mencari masukan terkait sistem penegakan etika di parlemen negara dimaksud.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	-	Kunjungan Kerja Dalam Negeri ke Polres Cimahi/Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada hari Rabu – Jum’at, 9 s.d 11 Juli 2025.	Melaksanakan Tugas dan Fungsi terkait Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD dan Sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI, ke Polres Cimahi.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri	Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka Penguatan Kelembagaan: 1. Tanggal 24 Juni-30 Juni 2025 ke Papua Nugini. 2. Tanggal 1-7 Juli 2025 ke Selandia Baru.	Tujuan Kunjungan Kerja luar negeri delegasi BURT DPR RI ini adalah untuk mempelajari dan berdiskusi tentang: 1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen yang telah dipraktekan oleh parlemen negara lain. 2. Model dan mekanisme komunikasi antara anggota parlemen dengan konstituennya. 3. Manajemen penganggaran parlemen. 4. Manajemen kepegawaian parlemen. 5. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kawasan kompleks parlemen, serta penataan kawasan kompleks parlemen. 6. Perencanaan dan implementasi <i>e-parliament</i> . 7. Manajemen sistem pendukung (<i>supporting system</i>) Parlemen yang bertugas memberi dukungan keahlian, teknis, dan administratif.	
2.	-	Rapat Pimpinan BURT dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025.	Pembahasan Rancangan Jadwal Kegiatan BURT MS IV TS 2024-2025.	
3.	-	Rapat BURT (Intern) dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025.	Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS IV Tahun Sidang 2024-2025.	
4.	-	Rapat BURT dengan Setjen DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2025 dengan agenda Nota Penjelasan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang RKA DPR RI Tahun 2026 Berdasarkan Pagu Indikatif.	RKA DPR RI Tahun 2026 Berdasarkan Pagu Indikatif Rp.6.552.560.883.000,- (<i>Enam triliun lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah</i>) dengan rincian:	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<div>1. Satker Dewan Rp.5.109.747.073.000,- (<i>Lima triliun seratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah</i>).</div> <div>2. Satker Setjen Rp.1.442.813.810.000,- (<i>Satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah</i>).</div>	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Keuangan Bank Indonesia 	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025.	Raker penyampaian Pokok-pokok Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2025.	
2	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Bank Indonesia 	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025.	Raker penyampaian KEM PPKF RAPBN TA 2026 dan RKP Tahun 2026.	
3	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Keuangan Bank Indonesia 	Rapat Panja dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025.	Panja Perumus Kesimpulan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2025.	
4	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Keuangan Bank Indonesia 	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025.	Penyampaian Laporan Panja Perumus Kesimpulan dan Pembahasan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2025.	
5	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Perasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025.	Raker pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Koordinator Bidang Pangan 			
6	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Keuangan Bank Indonesia 	Rapat Panja dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025.	Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2026.	
7	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan 	Rapat Panja dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025.	Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2026.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BAKN DPR RI	Rapat Pimpinan dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025.	TERTUTUP	
2.	BAKN DPR RI	Rapat Intern dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025.	TERTUTUP	
3.	BAKN DPR RI	Rapat Pimpinan dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Juli 2025.	TERTUTUP	
4.	PT Pupuk Kalimantan Timur	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dilaksanakan pada hari 2 s.d. 4 Juli 2025.	<p>Kunjungan kerja BAKN ke PT Pupuk Kalimantan Timur dilaksanakan dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap tata kelola pupuk bersubsidi.</p> <p>Kesimpulan hasil kunjungan kerja antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hingga Juli 2025, PT Pupuk Kaltim telah menyelesaikan penagihan piutang pemerintah tahun 2023 serta Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi yang dapat disalurkan mulai 1 Januari 2025 dengan stok 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>yang sudah melebihi kebutuhan. Penyaluran tetap melalui agen lama untuk menjaga stabilitas di lapangan.</p> <p>2. Sebagai produsen urea terbesar di Asia Tenggara, Pupuk Kaltim menargetkan produksi 6,4 juta ton pupuk pada 2025 dan hingga Maret telah memproduksi 257.000 ton pupuk bersubsidi. Distribusi pupuk dilakukan melalui jaringan luas yang mencakup ribuan distributor dan pengecer, didukung moda transportasi terintegrasi.</p> <p>3. PT Pupuk Kaltim masih memiliki kewajiban menindaklanjuti temuan-temuan BPK, baik yang lama maupun yang baru.</p>	
4.	BAKN DPR RI	Rapat Pimpinan dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Juli 2025.	TERTUTUP	
5.	<p>– <i>The Chamber of Deputies</i></p> <p>– <i>Auditoría Superior de la Federación</i></p>	Kunjungan Kerja Luar Negeri dilaksanakan pada hari 7 s.d. 13 Juli 2025.	<p>Kunjungan kerja BAKN ke negara Meksiko dilaksanakan dalam rangka memperoleh pemahaman dan pembelajaran mengenai sistem pengawasan keuangan negara, khususnya peran <i>The Chamber of Deputies dan Auditoría Superior de la Federación</i>.</p> <p>Maksud dan tujuan kunjungan kerja yaitu memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peran dan mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh <i>The Chamber of Deputies dan Auditoría Superior de la Federación</i> dalam sistem pengawasan keuangan negara di Meksiko; - Jadwal atau <i>time schedule</i> pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh <i>Auditoría Superior de la Federación</i>, serta mekanisme penyampaian hasil 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pemeriksaan tersebut kepada <i>The Chamber of Deputies</i> sebagai bagian dari proses akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Meksiko;</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur dan metode penelaahan yang dilakukan oleh <i>The Chamber of Deputies</i> terhadap laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh <i>Auditoría Superior de la Federación</i>, serta proses penyampaian hasil penelaahan tersebut kepada Parlemen Meksiko dan komite-komite terkait sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	-	Rapat BAM dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Juni 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda Pergantian dan Penetapan Pimpinan BAM DPR RI.	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 293/EXT-PKS/DPR RI/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 Perihal: Perubahan Penugasan Anggota FPKS DPR RI di Alat Kelengkapan Dewan, maka pada hari ini dilaksanakan Rapat Internal Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dengan agenda penetapan Pimpinan BAM DPR RI dari Fraksi PKS.2. Rapat BAM DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Bapak Saan Mustopa).3. Rapat BAM DPR RI menyetujui pergantian Ketua BAM DPR RI dari Fraksi PKS, sehingga susunan Pimpinan BAM DPR RI yang baru sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Ketua: Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.b. Wakil Ketua:<ol style="list-style-type: none">1) Adian Y.Y. Napitupulu, S.H.2) Dr. Tr. Agun Gunandjar S, Bc.IP., M.Si.3) Drs. H. Taufiq R. Abdullah4) dr. Hj. Cellica Nurrachadiana	
2.	-	Rapat Pimpinan dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Juni 2025, pukul 13.00 -14.00 WIB.	Tertutup.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	-	Rapat Intern dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Juni 2025, pukul 14.00 - 16.00 WIB.	Tertutup.	
4.	Kepala Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kab. Bogor dan pemohon perse-orangan atas nama Drs. Gunawan Subiyanto, M.M	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025, pukul 10.00 WIB dalam rangka mendengarkan aspirasi terkait Status Tanah Masyarakat yang masuk Kawasan Hutan Perhutani.	<p>1. Pemerintah Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 50-an, masyarakat telah mengisi wiliayah Desa Sukawangi melalui surat dan panggilan media elektronik radio dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Selanjutnya, pada tahun 1960, melalui surat keterangan perintah dari pembantu pelaksana kuasa perang daerah sebagai pengembalian rakyat kampung Arca dan Cikuray Desa Sukaharja dan pembantu khusus dari JON 313 dalam penyelesaian GRBL.SMK Saat ini Desa Sukawangi dihuni oleh 13.574 jiwa yang terdiri dari 6.938 jiwa laki-laki dan 6.636 jiwa Perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.165 KK yang tersebar di 5 dusun dengan jumlah 10 RW dan 44 RT. Permasalahan terjadi setelah terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.287/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang di dalamnya mencakup Desa Sukawangi 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>yang pada saat surat tersebut terbit, Desa Sukawangi telah ada pada kondisi sebagaimana dijelaskan dalam poin huruf a dan b.</p> <p>d. Dalam rangka Menindaklanjuti surat Keputusan tersebut diatas, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SP.DIK.07/PPK/PPNS/05/2025 pada tanggal 15 Mei 2025.</p> <p>e. Pada tanggal 15 Maret 2025, Kementerian Kehutanan RI telah memasang spanduk terkait larangan memasuki kawasan hutan yang berada di Desa Sukawangi.</p> <p>f. Melalui surat tersebut, telah dilakukan proses penyidikan perkara tindak pidana dibidang kehutanan yaitu “menggunakan Kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang atau menggunakan Kawasan hutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan” kepada 6 orang yang berstatus sebagai saksi.</p> <p>g. Di Desa Sukawangi terdapat berbagai fasilitas publik dan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut: Kantor Desa Sukawangi, bangunan PAUD (10 unit), sekolah dasar negeri (6 unit), sekolah dasar madrasah (1 unit), SMP Negeri (1 unit), SMP Madrasah (4 unit), SMA (4 unit), pondok pesantren (5 unit), masjid jami’ (35 unit), madrasah (10 unit), Puskesmas Pembantu (1 unit),</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Posyandu (7 unit), lapangan sepakbola (3 titik), lapangan voli (7 titik), irigasi, embung, sarana jalan sepanjang 89 km, dan sarana instalasi listrik.</p> <p>h. Terkait dengan permasalahan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Desa Sukawangi meminta beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meminta BAM DPR RI menyampaikan aspirasi terkait penataan batas ulang kawasan hutan sejumlah 1.800 ha yang masuk di wilayah Desa Sukawangi yang terdiri dari beberapa bukti kepemilikan <i>Letter C</i> dan 2.000 bidang SHM berdasarkan PTSL tahun 2022-2023 sebagaimana terlampir. 2) Meminta BAM DPR RI untuk menyampaikan kepada pihak terkait agar melakukan penghentian proses penegakan hukum oleh Kementerian Kehutanan RI c.q. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan RI kepada masyarakat Desa Sukawangi. <p>2. Drs. Gunawan Subiyanto, M.M., permohonan perseorangan menyampaikan aspirasi antara lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat permasalahan pada 13 SHM yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor Tahun 2003 dan 2004, dengan alas hak milik Adat <i>Letter C</i>. b. Bahwa sebelum diterbitkannya 13 SHM oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor, pada tahun 2002 BPN Kabupaten 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Bogor telah berkirim Surat ke Perum Perhutani III Bandung perihal Klarifikasi tanah desa Karang Tengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.</p> <p>c. Departemen Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Satuan Kerja Taman Wisata Alam Gunung Pancar membentuk Tim dan melakukan Peninjauan dan Pemeriksaan Lapangan Batas Wilayah Kawasan Hutan dengan Tanah Milik Adat masyarakat, dengan hasil kesimpulan bahwa tanah berhimpit/tidak masuk kawasan hutan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Pancar sebagaimana terlampir yang selanjutnya dijadikan dasar untuk melanjutkan proses penerbitan sertipikat.</p> <p>d. Akan tetapi dengan beberapa kali telah dilakukan pengecekan Sertipikat ke BPN Kabupaten Bogor, ternyata Hasil Pengecekan SHM selalu dibubuhi Catatan tinta merah yang berkait bahwa Tanah yang dimaksud masuk kawasan hutan perhutani</p> <p>e. Terkait permasalahan tersebut, pemohon sudah menyampaikan permohonan kepada BPN Kabupaten Bogor pada 7 April 2025 yang dalam pokoknya meminta agar 13 bidang tanah yang telah terbit SHM nya tersebut dapat dikeluarkan dari blokir internal ATR/BPN.</p> <p>f. Pemohon juga telah menyampaikan surat ke Menteri Kehutanan RI pada 26 Juni 2025 yang pada intinya meminta agar 13 bidang tanah yang telah terbit SHM nya</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sebagaimana dimaksud dapat dikeluarkan dari kawasan hutan.</p> <p>g. Terkait dengan hal tersebut, maka Drs. Gunawan Subiyanto, M.M., meminta kepada BAM beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meminta BAM DPR RI memberikan petunjuk dan arahan sehingga 13 bidang tanah yang telah terbit SHM sebagaimana terlampir dapat dimiliki sepenuhnya oleh pemilik lahan dan tidak menjadi lahan yang bermasalah. 2) Memohon kepada BAM dapat merekomendasikan kepada pihak terkait agar 13 bidang tanah yang telah terbit SHM tersebut dapat dapat digunakan oleh pemilik lahan sebagaimana mestinya. <p>3. Terhadap Aspirasi Masyarakat BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. BAM DPR RI memahami bahwa masih terjadi tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan lahan di berbagai daerah di Indonesia yang disebabkan oleh permasalahan <i>data base</i> pertanahan yang tidak terintegrasi dengan baik. c. BAM DPR RI menyampaikan bahwa permasalahan yang dialami oleh para pemohon banyak terjadi di berbagai daerah di Jawa Barat dan provinsi lainnya di Indonesia mengingat jumlah desa hutan di seluruh Indonesia mencapai 25.863 desa. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> d. BAM DPR RI menyampaikan bahwa perjuangan terhadap kepemilikan tanah di kawasan hutan ini sangat penting mengingat keberadaan yang sangat vital sebagai bagian dari ekosistem ketahanan pangan nasional kaitannya dengan produksi komoditas bahan pangan lokal. e. BAM DPR RI akan menyampaikan surat kepada AKD terkait yang dalam hal ini terdiri dari Komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V DPR RI untuk meminta kepada AKD tersebut menyikapi permasalahan sebagaimana dimaksud dan tidak hanya pada 2 (dua) desa yang mengajukan aspirasi kepada BAM DPR RI, tetapi untuk 25.863 desa lainnya yang masuk dalam kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. 	
5.	Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan TNTN Riau, YLBH Cerdas Bangsa	RDPU dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025, pukul 13.00 WIB s.d. selesai dengan agenda Mendengarkan aspirasi terkait Status Perlindungan Hukum dan Hak Hidup Rakyat yang tinggal di Desa-Desa Sekitar Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan Pengrusakan Tanaman Masyarakat Petani Sawit Desa di Propinsi Riau.	1. Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya dan Koperasi Tani Lubuk Indah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> a. Sejak 2004 Kementerian Kehutanan menerbitkan surat keputusan mengenai 38.578 ha lahan Perhutani tanpa memperhatikan keberadaan lahan masyarakat dan langsung diklaim surat keputusan tersebut bersifat definitif yang seharusnya dilakukan proses penataan ulang terlebih dahulu. b. Masyarakat mengharapkan keputusan penetapan TNTN ditinjau ulang mengingat masih terjadi tumpang tindih dan bertabrakan dengan hak kepemilikan 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>masyarakat yang telah diperoleh sejak tahun 1998/1999 melalui program pemerintah atau Prona.</p> <p>c. Permasalahan ini sudah pernah digugat di pengadilan dan hasilnya memenangkan masyarakat. Namun, faktanya putusan pengadilan tidak dipatuhi dan terjadi diskriminasi.</p> <p>d. SK No.255/Menhut-II/2004 yang telah diterbitkan baru berbentuk penunjukan, masih ada beberapa tahapan yang belum ditindaklanjuti, antara lain penetapan. Namun, Perhutani sudah mengklaim lahan tersebut adalah milik TNTN.</p> <p>e. Keberadaan koperasi adalah sah secara hukum berdasarkan surat penunjukan oleh Camat dan Bupati pada tahun 1998.</p> <p>2. Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Riau TNTN (FMKTKHPR) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.</p> <p>a. Pada Juni 2025, masyarakat mendapati adanya penyegehan, keterlibatan militer, larangan penerimaan pendaftaran sekolah, TBS tidak dibolehkan diterima oleh pabrik, dan permintaan Satgas kepada PLN untuk pemutusan listrik pada kawasan TNTN. Selain itu, masyarakat (<i>kurang lebih 25.000 jiwa</i>) didesak oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>untuk keluar atau relokasi mandiri dari TNTN paling lambat sampai 22 Agustus 2025.</p> <p>b. Masyarakat sudah ada dari tahun 1998 sedangkan hutan primer sudah tidak ada, yang ada hanya semak belukar. Namun karena adanya TNTN, masyarakat dituduh sebagai perambah, pendatang, penduduk ilegal padahal ber-KTP.</p> <p>c. Salah satu syarat menjadi taman nasional adalah hutan yang alami. Adapun proses yang harus dilalui adalah penunjukan, tata batas, penataan dan penetapan. Sementara itu, TNTN masih dalam tahap penunjukan.</p> <p>d. Sejak terbitnya SK pengukuhan TNTN tahun 2014, masyarakat tidak mendapatkan perhatian sampai Juni 2025</p> <p>e. Masyarakat siap untuk menghijaukan lahan TNTN apabila pemerintah mau menarik setengah dari 153.000 ha bagian dari <i>Landscape</i> TNTN, (75.000 ha).</p> <p>f. FMKTHPR TNTN berharap agar DPR RI memfasilitasi kepada para pihak agar masyarakat dapat menjual hasil kebun sawit dari panen yang terdampak dari TNTN tetap diterima pabrik, sekolah dibuka kembali, penarikan 500 personil militer. Selain itu, FMKTHPR TNTN meminta BAM DPR RI memfasilitasi pembentukan panitia khusus (pansus) dan mendorong</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>agar pemerintah meninjau ulang Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.</p> <p>3. YLBH Cerdas Bangsa menyampaikan sebagai berikut.</p> <p>a. Keberadaan masyarakat Petani Eks Transmigrasi UPT II Desa Sumber Jaya, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi sudah ada sejak tahun 1991, 1992 dan 1993 melalui program transmigrasi. Masyarakat dulu diberi rumah dan lahan bercocok tanam. Karena gangguan hama, masyarakat mengganti jenis tanamannya menjadi sawit. Sejak awal masyarakat menguasai lahan tidak pernah mengalami masalah dengan siapapun, baik perusahaan maupun pemerintah dan masyarakat selalu taat membayar pajak.</p> <p>b. Perbuatan pengrusakan perkebunan masyarakat pada 9 Februari 2022 telah dilaporkan ke Polda Riau tetapi akhirnya berhenti di tahap penyelidikan dengan alasan kurangnya bukti padahal lahan warga yang dimiliki dan dikuasai sebagian dalam bentuk kepemilikan SHM dan SKT dari kecamatan.</p> <p>c. Masyarakat dianggap masuk ke dalam lahan HGU PT Wanasari sehingga dilaporkan ke Polda Riau, padahal masyarakat telah memiliki alas hak, baik dalam bentuk SHM dan SKT dari kecamatan.</p> <p>d. Masyarakat yang memiliki hak kepemilikan lahan dalam bentuk SKT pada tahun 2013 pernah meminta</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pengukuran lahan kepada BPN Kab. Kuantan Singingi untuk penerbitan SHM kemudian BPN mengeluarkan keterangan surat ukur. Namun, ketika surat keterangan digunakan untuk mengurus SHM, BPN menolak. Kemudian masyarakat mengajukan gugatan TUN dan menang.</p> <p>e. Awalnya PT Wanasari ditunjuk untuk membangun Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Transmigrasi dengan 4400 KK dan diberi lahan seluas 2200 ha. Namun faktanya, PT Wanasari memiliki 3 (tiga) HGU dengan luas 5316 ha, dimana terdapat kelebihan atau penambahan areal diluar ketentuan.</p> <p>f. Pada tanggal 9 Februari 2022 perusahaan menumbang paksakan 30 ha lahan menggunakan alat berat dan masyarakat mengalami intimidasi.</p> <p>4. Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya dan Koperasi Tani Lubuk Indah, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Riau TNTN (FMKTKHPR), YLBH Cerdas Bangsa, menyampaikan dokumen pendukung berupa: <i>copy</i> putusan pengadilan, <i>copy</i> bukti kepemilikan lahan berupa SHM, <i>copy</i> data kependudukan, data domisili warga, <i>copy</i> berkas permohonan penyelesaian sengketa tanah, berkas data penduduk dan fasilitas umum.</p> <p>5. BAM DPR RI memberikan tanggapan, antara lain:</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. BAM DPR RI memahami aspirasi yang disampaikan Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Koperasi Tani Lubuk Indah, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Riau TNTN (FMKTKHPR), dan YLBH Cerdas Bangsa. b. BAM DPR RI menerangkan bahwa pelaksanaan Penertiban Kawasan TNTN harus memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak. c. BAM DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dengan berkirim surat kepada Pimpinan DPR RI agar ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait, yaitu Komisi II, III, dan IV DPR RI. 	
6.	Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) terkait Draft RUU tentang Ketenagakerjaan	RDPU dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2025 Pkl. 13.00 s.d. selesai Mendengarkan Aspirasi terkait Draft RUU tentang Ketenagakerjaan.	<p>1. Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang merupakan aliansi yang terdiri dari berbagai federasi serikat buruh, akademisi, peneliti, dan advokat, yang fokus pada isu-isu kesejahteraan nasional, khususnya terkait ketenagakerjaan, menyampaikan poin utama kajian RUU Ketenagakerjaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUU ini menggunakan UU 13/2003 sebagai rangka dalam batang tubuh; substansi yang masih relevan masih dipertahankan. b. Judul RUU yang diusulkan adalah UU tentang Perlindungan Kerja karena ketenagakerjaan merupakan perlindungan yang wajib diberikan oleh negara kepada pekerja sebagai pihak yang lemah secara struktural dan ekonomis. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Beberapa muatan RUU Ketenagakerjaan baru yang dinilai penting adalah: (1) hubungan kerja – perjanjian kerja, (2) pemborongan dan penyedia jasa pekerja, (3) pengupahan, (4) peran partisipasi aktif dewan pengupahan, (5) upah minimum dan upah minimum sektoral, (6) peninjauan upah, SuSU, mikro kecil, (7) daluwarsa upah dan larangan mengurangi jaminan sosial yang sudah lebih baik, (8) pemutusan hubungan kerja, (9) pengawas dan pengawasan ketenagakerjaan, (10) pidana dan sanksi administratif.</p> <p>d. Selain pokok muatan tersebut di atas, Gekanas juga mengusulkan perubahan: hubungan industrial Pancasila, kesempatan dan perlakuan yang sama, waktu kerja dan hak istirahat panjang, tidak wajib bekerja bagi pada hari pertama dan kedua waktu haid, cuti melahirkan, mendampingi istri melahirkan dan kesempatan menyusui selama waktu kerja, pelatihan kerja dan pemaganagn, penggunaan tenaga kerja asing, perjanjian kerja bersama, hak pekerja dalam hal perusahaan dalam keadaan PKPU dan pailit.</p> <p>2. Terhadap aspirasi yang disampaikan Gekanas, BAM DPR RI menanggapi sebagai berikut.</p> <p>a. BAM DPR RI sepakat bahwa dalam melakukan revisi undang-undang perlu melibatkan partisipasi yang luas sehingga kepentingan semua pihak dapat terakomodasi.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. BAM DPR RI akan mengawal aspirasi Gekanas pada pembahasan di Komisi IX, termasuk soal rasio kenaikan UMR. c. BAM DPR RI berpendapat bahwa revisi terhadap UU Cipta Kerja merupakan hal yang logis mengingat orientasi UU tersebut adalah investasi, sementara seharusnya orientasi dari UU tersebut adalah kesejahteraan pekerja. d. BAM DPR RI memandang bahwa DPR RI dapat berperan dalam membentuk formulasi untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan relasi tripartit antara pemerintah, pekerja dan pengusaha. 	
7.	Kunjungan Kerja ke Pekanbaru, Riau	Kunjungan Kerja (BAM) dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Juli 2025 dalam rangka Perlindungan Hak Hidup Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.	Catatan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan Kerja BAM DPR ke Riau berawal dari adanya penyampaian aspirasi masyarakat ini pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BAM DPR RI tanggal 2 Juli 2025; 2. BAM DPR RI berharap akan adanya langkah konkret dan solusi dari Pemerintah Daerah atas permasalahan yang terjadi di Kawasan Nasional Tesso Nilo (TNTN). 3. Masyarakat telah mendiami TNTN sudah sejak 10-15 tahun lalu dan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Fasilitas publik turut berdampak seperti sekolah, tempat keagamaan dan lain-lain yang merupakan tempat pertemuan masyarakat setempat. Sandang pangan masyarakat juga harus diperhatikan. 4. Negara menjamin hak masyarakat atas kelangsungan hidupnya; 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Kehadiran BAM DPR RI untuk melihat secara langsung masyarakat berdampak dari TNTN; 6. Mempertanyakan mengenai upaya pemutusan aliran listrik oleh Satgas PKH; 7. Hasil kunjungan kerja akan ditindak lanjuti kepada kementerian dan AKD terkait; 8. Lebih lanjut hasil Kunjungan Kerja ini akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI dan AKD terkait serta Pemerintah sebagai masukan dan pertimbangan dalam pembahasan Pelaksanaan kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Provinsi Riau.	
8.	Kunjungan Kerja ke Cibinong, Bogor	Kunjungan Kerja (BAM) dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Juli 2025 Penataan Status Tanah Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kab. Bogor.	Catatan: 1. Kunjungan Kerja BAM DPR ke Kabupaten Bogor berawal dari adanya penyampaian aspirasi masyarakat ini pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BAM DPR RI tanggal 2 Juli 2025. 2. Terkait dengan permasalahan yang terjadi di Sukawangi dan berbagai daerah di Indonesia, BAM DPR RI ingin memastikan bahwa penyelesaian masalah harus dengan prinsip menguntungkan semua pihak. 3. Terkait dengan penataan kawasan hutan, kita perlu melihat UU 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di mana Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia, dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatnya. UU ini juga menekankan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>konservasi, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup di sekitar kawasan konservasi.</p> <p>4. Untuk itu BAM DPR RI memandang bahwa pemerintah telah memiliki niat baik untuk meningkatkan fungsi hutan dan mendayagunakan hutan sesuai peruntukan dan kebutuhannya bagi Masyarakat secara berkelanjutan. Namun di dalam implementasinya tentu menemui tantangan dan kendala di masing-masing wilayah. Ada banyak persoalan terkait tata kelola, penguasaan, dan kepemilikan di wilayah hutan. Tantangan tersebut juga menyiratkan tumpang tindihnya kepemilikan lahan individu, lahan pedesaan, atau kelompok dengan lahan negara yang masuk ke dalam peta kawasan hutan negara oleh Pemerintah. Klaim kawasan hutan negara yang sudah masuk, tentu yang saat ini telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, pertambangan, atau perkebunan yang tersebar di wilayah Pulau Jawa.</p> <p>5. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor di mana sekitar 1.800 Ha tanahnya telah diklaim masuk wilayah hutan oleh Kementerian Kehutanan. Dalam perkembangannya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SP.DIK.07/PPK/PPNS/05/2025 pada tanggal 15 Mei 2025, kepada 6 orang warga Desa Sukawangi.</p> <p>6. Ada keresahan dan ketakutan warga terkait aksi Kementerian Kehutanan tersebut, karena dianggap dapat</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>mengacam kelangsungan hidup masyarakat desa yang telah terbentuk sejak tahun 1980-an.</p> <p>7. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, terdapat sekitar 20-30 desa yang masuk ke dalam Kawasan kehutanan khususnya di wilayah Kabupaten Bogor saja, dan lebih dari 25.000 desa hutan di seluruh Indonesia.</p> <p>8. Kementerian Kehutanan tidak boleh merujuk pada regulasi tahun 1927, di mana saat itu Indonesia belum ada. Jika merujuk pada waktu tersebut, maka hampir semua kawasan di Indonesia ini adalah hutan. Sebaliknya, harus merujuk pada UU terkait kehutanan setelah Indonesia merdeka, agar ada prinsip keadilan bagi masyarakat.</p> <p>9. Pemerintah perlu duduk bersama untuk melihat dari penetapan hutan di tahun 1996, berapa ha yang ada di Desa Sukawnagi dan bagaimana luasan yang ada saat ini. Hal ini perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian antara luasan penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan dengan dengan luasan kawasan desa.</p> <p>10. Terkait dengan SK Kemenhut menyangkut Desa Sukawangi, saat ini telah ada 6 tersangka, dan ada 2.000 lagi yang bisa jadi tersangka, karena potensi sanksi pidana. Hal ini perlu dibahas secara serius, karena ini menyoal hak dasar warga negara.</p> <p>SARAN / REKOMENDASI Berdasarkan kunjungan kerja yang dilakukan, BAM DPR RI memberikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:</p> <p>1. BAM DPR RI merekomendasikan adanya pertemuan lanjutan dengan DPR, Kementerian/Lembaga, Pemerintah</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Daerah, dan instansi terkait lainnya dalam rangka merumuskan penyelesaian terkait masalah ini agar tidak berlarut-larut.</p> <p>2. Perlu dilakukan pertemuan lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait baik dengan skema diskusi kelompok terpumpun atau sejenisnya dalam rangka merumuskan penyelesaian persoalan sebagaimana dimaksud.</p> <p>3. Mendorong kepada Kementerian Kehutanan agar lebih banyak lagi melibatkan perwakilan dari berbagai unsur dalam pembentukan tim penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud.</p> <p>4. Mendorong kepada Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan untuk menghindari penggunaan kalimat-kalimat yang membuat resah masyarakat terkait dengan permasalahan di kawasan hutan.</p> <p>5. Perlu melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka untuk mendapatk informasi yang menyeluruh terkait penyelesaian permasalahan desa hutan sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Kehutanan RI.</p>	
